

2.2 EVALUASI PROGRAM RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018 telah melaksanakan 37 Bidang Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 129 Program, dan 230 Indikator Program serta didalamnya terdapat 1.013 kegiatan yang dilaksanakan oleh 41 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang, 36 program dan 302 kegiatan yang tersebar di 8 (delapan) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp3.024.594.280.000,- dan realisasi sebesar Rp2.548.952.164.085,- atau sebesar 84,27% dengan realisasi fisik sebesar 94,29%. Adapun Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

2.2.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan didukung oleh 5 program dan 42 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.077.723.230.000,- dan realisasi sebesar Rp888.362.441.626,- atau sebesar 82,43% dengan realisasi fisik sebesar 84,26%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Anggaran yang tidak terserap disebabkan antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektorial terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan dengan adanya Sosialisasi Keputusan Gubernur dan Rapat awal Penyusunan Keputusan Gubernur yang tidak bisa menyerap anggaran fullboard, padahal sewaktu penganggaran di APBD-P bisa namun pada kenyataannya setelah APBD-P ditetapkan tidak boleh menyerap anggaran Fullboard. Namun, kegiatan tetap berjalan dan substansi kegiatan tetap terlaksana;
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan pengadaan lahan dibatalkan berdasarkan Surat Plt. Kepala BPKAD Nomor 900/1727-BPKAD.02/2018 Tanggal 27 Desember 2018. Selain itu di SMK 7 Kota Tangerang Selatan sudah terbangun gedung sekolahnya, namun tidak ada akses jalan masuk ke sekolah tersebut dikarenakan belum terbitnya Surat Penetapan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) serta waktu yang tidak mencukupi;
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan rehabilitasi kantor yang belum mendesak untuk direhabilitasi, pemeliharaan kendaraan mengalami efisiensi karena adanya pengadaan kendaraan baru, efisiensi pemeliharaan barang dan adanya efisiensi kontrak;
4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan antara lain:
 - a) Pengadaan promosi dan publikasi tidak bisa terserap karena harus satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b) Ada Fasilitas UNBK yang di dalamnya ada pengadaan soal-soal ujian dan honor-honor pengadaan soal ujian. Sehingga tidak bisa terserap karena bukan tupoksi di Subag Umum dan Kepegawaian;

- c) Ada anggaran untuk honor guru sekolah inklusif tidak bisa terserap karena tidak ada di SSH, SBK atau di peraturan khusus lainnya.
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dikarenakan adanya anggaran untuk diklat calon kepala sekolah yang semula direncanakan dilaksanakan di Solo tapi kemudian dipindahkan ke LPMP. Namun di kedua tempat tersebut tidak dilaksanakan diklat ini. Diklat calon kepala sekolah ini seharusnya menjadi tupoksi Bidang Mutendik, dan Perencanaan penganggaran tidak sesuai aturan.
 6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya aturan tidak menggunakan fasilitas hotel dalam pelaksanaan kegiatan serta adanya efisiensi;
 7. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan sisa anggaran yang tidak diserap dikarenakan adanya kesalahan perencanaan penganggaran karena di dalamnya ada kegiatan promosi dan publikasi sehingga tidak berhubungan dengan kegiatan kearsipan dan perpustakaan;
 8. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya belanja listrik dan internet tidak bisa dicairkan karena menumpang di gedung PGRI, Belanja pajak kendaraan bermotor/ BBNKB sudah dianggarkan di unit Induk yang dalam hal ini kegiatan pemeliharaan Sarpras Kantor serta efisiensi kontrak;
 9. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan Belanja pajak kendaraan bermotor/BBNKB sudah dianggarkan di Unit Induk yang dalam hal ini Kegiatan Pemeliharaan Sarpras kantor, Tidak terserapnya SPPD dalam Daerah masukan dari Inspektorat bahwa dalam kota yang sama tidak diperbolehkan adanya SPPD serta SPPD luar Daerah yang sudah tercantum pada DPA tidak sama dengan daerah yang dituju, adanya efisiensi kontrak;
 10. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dikarenakan Belanja pajak kendaraan bermotor/BBNKB sudah dianggarkan di Unit Induk yang dalam hal ini

Kegiatan Pemeliharaan Sarpras kantor, belanja listrik, dokumentasi dan SPPD tidak direalisasikan;

11. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA Negeri untuk sasaran BOSDA 147 SMAN sengan besaran Rp.2 Juta per siswa. Disebabkan antara lain:

- a) Dalam belanja BOSDA semua tolak ukur terlaksana, terkendala untuk belanja operasional bulanan sekolah (listrik, telpon, air, internet, surat kabar) dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah di sekolah yang tidak dapat diserap karena adanya efisiensi;
- b) Terdapat perbedaan pada satuan harga belanja modal, belanja barang dan jasa di tiap sekolah;
- c) Adanya pergantian PPTK di Bulan Agustus, sedangkan masih banyak kegiatan yang belum terserap;
- d) Pada saat penyusunan DPA belum ada Juklak dan Juknis pengelolaan kegiatan BOSDA; dan
- e) Efisiensi kontrak.

12. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMK Negeri disebabkan adanya efesiensi dari belanja barang jasa serta pegawai, Belanja modal dan jasa karena harga yang tercantum dalam pagu DPA lebih kecil daripada harga dipasar saat ini sehingga tidak bisa direalisasikan, Barang banyak yang sudah discontinue tidak diproduksi lagi dipasaran;

13. Kegiatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) disebabkan:

- a) Pengadaan mebeulair tidak tercapai dikarenakan barangnya tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan (mebeulair kelas, perpustakaan dan kantor) serta adanya efisiensi;
- b) Ada FS yang tidak terserap karena pada tahun yang sama sekolah tersebut mendapat bantuan dari pusat;
- c) 2 RPS dan 2 paket alat tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

14. Kegiatan Pendidikan Khusus (DAK FISIK) disebabkan adanya perbedaan rencana anggaran dari pusat dan di DPA. Untuk perbedaan yang tidak terlalu jauh masih bisa dilaksanakan

15. Pada kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan Khusus; dan kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK disebabkan antara lain:

- a) Bantuan Kualifikasi tidak terserap karena dasar hukumnya belum jelas sehingga kegiatannya tidak dilaksanakan;
 - b) Penilaian angka kredit untuk asesor honornya tidak bisa dibayarkan karena pegawai provinsi. Selain itu juga terkendala dengan tempat, karena ruangan yang ada di Dinas tidak mencukupi (pelaksanaan Penilaian Angka Kredit mencapai 10 hari).
16. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan terkendala disebabkan :
- a) Lomba berjenjang belum ada SK penetapan juara Nasional semua Cabang Olahraga dari Kementerian sebagai dasar pencairan hadiah;
 - b) Beasiswa belum ada regulasinya sehingga tidak bisa diserap.
17. Kegiatan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dikarenakan adanya kode rekening Belanja Jasa Tenaga Ahli tidak sesuai peruntukannya, dan uang saku tidak terserap semua dikarenakan ketidakhadiran peserta;
18. Pada beberapa kegiatan lainnya disebabkan adanya efisiensi kontrak.

b). Solusi

- 1. Solusi dari permasalahan untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, pelaksanaannya dilakukan di sekolah atau aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan di SMA CMBBS;
- 3. Pengadaan lahan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor akan diusulkan pada perubahan anggaran tahun 2019;
- 4. Solusi dari Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran untuk kedepan akan segera diusulkan SSH Honorarium Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif ke BPKAD;
- 5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terkait dengan diklat akan dianggarkan kembali di tahun depan karena syarat menjadi kepala sekolah yaitu harus lulus diklat calon kepala sekolah terlebih dahulu sehingga diklat ini sangat penting;

6. Pada Kegiatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) terkait pengadaan mebeulair untuk kelas, perpustakaan dan kantor dianggarkan kembali di tahun 2019;
7. Kegiatan Pendidikan Khusus (DAK FISIK) untuk perencanaan penganggaran di tahun selanjutnya akan disesuaikan dengan kebijakan Kementerian (Pusat);
8. Akan dilakukan lebih cermat dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta menyusun Juknis pengelolaan Bosda.
9. Solusi yang akan dilakukan terhadap kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMK Negeri antara lain:
 - a) Memperbaiki perencanaan dengan menghitung kembali secara matang kebutuhan pegawai dan belanja jasa listrik dan telpon, dll sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah;
 - b) Menghitung dengan baik dan mencari informasi seluas - luasnya tentang harga barang dan produk - produk yang dibutuhkan oleh sekolah yang masih beredar di pasaran beserta perhitungan kalkulasi harganya sehingga barang yang dibutuhkan bisa terealisasi.
 - c) Memberikan pendampingan kepada pihak satuan pendidikan ketika melakukan perencanaan sehingga terwujud perencanaan yang baik.
10. Penilaian Angka Kredit, kegiatannya tetap dilaksanakan di KCD terkait dengan permasalahan pada kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan Khusus; dan kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK;
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengirimkan surat untuk menanyakan SK Penetapan Juara Nasional namun belum ada jawaban terkait Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan.

2.2.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan didukung oleh 8 program dan 68 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp371.206.890.000,- dan realisasi sebesar Rp287.753.429.118,- atau sebesar 77,52% dengan realisasi fisik sebesar 90,92%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, RSUD Banten), adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, sisa anggaran yang tidak terserap terkait honor narasumber dikarenakan narasumber tidak hadir;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat belanja peserta kursus dari BKKM yang tidak dilaksanakan;
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah terkendala kelebihan anggaran dan kordinasi internal;
4. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, rendahnya serapan anggaran dikarenakan adanya efisiensi pada kode rekening uang saku peserta pertemuan penyusunan profil dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir;
5. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK), rendahnya serapan anggaran dikarenakan oleh penyaluran anggaran DAK melalui transfer daerah tahap satu dilaksanakan pada bulan Juni 2018, Proses pengajuan LS dan TU baru dapat dilaksanakan pada akhir Juli. Pada Tolok Ukur Rujukan Spesimen sebesar Rp.344.470.000,- tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus rujukan spesimen kesehatan masyarakat;
6. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur kegiatan yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow Germas ke 8 Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya Efisiensi meliputi Belanja Sewa Tempat, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Jasa Narasumber. Belanja sewa Tempat tidak di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas pemerintahan yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp200.000.000 Sewa Gedung dan Rp800.000.000 Belanja Promosi dan Publikasi di media TV lokal);
7. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, sisa anggaran tidak terserap karena adanya perubahan kode rekening dari

Honorarium Tim Medis menjadi Uang Saku Tim Medis yang berakibat adanya sisa anggaran pada setiap tolok ukur;

8. Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan pada tolok ukur Penguatan imunisasi rutin, honor KOMDA KIPI terdapat sisa anggaran dikarenakan untuk PNS tidak diperbolehkan mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan pasca imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas KAB/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon adanya perlengkapan KLB yang tidak diserap dikarenakan masih tersedianya stok perlengkapan KLB;
9. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang, adanya Efisiensi penyerapan perlengkapan peserta kegiatan, Kasus DBD di seluruh Kab./Kota cenderung menurun dan kebutuhan pengendalian kasus melalui pelaksanaan fogging masih dapat di tanggulangi oleh Kab./Kota. Sehingga permintaan Fogging menggunakan APBD Provinsi menurun, Efisiensi harga penyediaan larvasida malaria;
10. Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, sisa anggaran tidak terserap karena pada pengadaan obat melalui mekanisme E-Purchasing/E-Katalog terdapat penolakan dari pihak penyedia dengan alasan tidak tersedia bahan baku obat / kuota sudah habis;
11. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK), disebabkan adanya efisiensi nilai kontrak / pekerjaan;
12. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping terealisasi 44,06% dari anggaran sebesar Rp1.396.140.000,- dikarenakan pada Belanja pemeliharaan AC Central, AC Izone, pemeliharaan incinerator dan Pemeliharaan Generator Oksigen tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup;
13. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping, terealisasi 76,02% dari anggaran sebesar Rp6.861.088.370,- atau dikarenakan :
 - Adanya hasil temuan BPKP pada belanja outsourcing satpam yang harus mengembalikan uang sehingga kegiatan tersebut tidak bisa direalisasikan sisa pembayarannya;

- Belanja pengadaan non kapitalisasi yang tidak dilaksanakan berupa pengadaan partisi poli rawat jalan;
14. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada RSUD Malingping, terealisasi 43,47% dari anggaran sebesar Rp525.000.000,- dikarenakan :
- Anggaran pelatihan pada kegiatan ini hanya diperuntukan untuk tenaga PNS saja sedangkan untuk tenaga Non PNS di anggarkan pada kegiatan BLUD.
 - Adanya perbedaan dari cara pembayaran pelatihan, dimana anggaran pada kegiatan ini hanya membayar biaya pelatihan/seminar/workshop saja tidak termasuk uang saku dan transpot. Untuk biaya uang saku dan transpot dibayarkan pada anggaran BLUD sehingga penyerapan pada anggaran ini rendah;
15. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor RSUD Banten yang dilaksanakan RSUD Banten dengan capaian fisik 87.44%, hal ini disebabkan:
- Penyediaan pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel / Genset serta pengadaan instalasi gardu listrik tidak terealisasikan Rehabilitasi Gedung CSSD baru 36,00%, dan pelapisan dinding gedung OK/IBS belum terealisasikan;
 - Serta Pada pengadaan lahan 2 Hektar; hasil penentuan harga tanah oleh jasa JKPP/Apraisal lebih efisien di bandingkan dengan rencana harga pembelian sehingga harga awal di DPA dapat di efisiensikan semula 40 milyar terserap 22,2 Milyar efisiensi 17 Milyar;
 - Pada pengadaan genset dan instalasinya sebesar 4.5 Milyar sudah di lelangkan dan sudah ada pemenangnya akan tetapi setelah di telaah oleh RS dokumen tender / lelang dari penyedia ada kelebihan penawaran yang lebih besar dari HPS sehingga hasil lelang tersebut di batalkan oleh pihak RSUD Banten;
 - Adanya efisiensi kontrak dari pengadaan yang bersifat lelang sebesar 1,7 Milyar.
16. Kegiatan Penyediaan barang dan jasa RSUD Banten yang dilaksanakan RSUD Banten dengan capaian fisik 99,52%, hal ini disebabkan tidak di serapnya belanja paket pengiriman barang keluar Rumah Sakit;

17. Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping, terealisasi 66,41% dari anggaran sebesar Rp2.192.719.800,- dikarenakan adanya sisa anggaran/sisa kontrak pada belanja makan dan minum pasien;
18. Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000,-, dikarenakan Pendapatan fungsional ada yang masih dalam bentuk piutang sehingga realisasi mencapai Rp8.218.711.962,08,- atau 65,45%. Sedangkan belanja BLUD hanya boleh dari pendapatan Fungsioanl BLUD dalam tahun berjalan sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan realisasi pendapatan, sementara piutang Pendapan Fungsional BLUD Kurang lebih 2 Milyar tidak bisa di bayarkan karena Klaim BPJS belum di bayar dari bulan juni s/d desember 2018 sebesar 2 Milyar; RSUD Malingping mempunyai surplus BLUD tahun 2017 sebesar RP.3.000.000.000,- akan tetapi tidak dapat di gunakan karena belum ada kode rekeningnya dalam DPA BLUD;
19. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada RSUD Banten dengan capaian fisik 17,55% dan keuangan 82.52%, hal ini disebabkan adanya:
 - Perjalanan dinas yang di biyai oleh anggaran BLUD;
 - Perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan sehingga Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD Banten, Sisa realisasi keuangan 13,87% sebesar 350.511.700 di sebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan;
21. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten, Sisa realisasi 19.85% atau Rp.22.349.747,- disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan penganggaran kenyataannya,serta adanya pengalihan pendanaan kepada pendanaan RBA BLUD TA.2018;
22. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja, disebabkan adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah direncanakan (Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi);

23. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur kegiatan yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow Germas ke 8 Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya Efisiensi meliputi Belanja Sewa Tempat, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Jasa Narasumber. Belanja sewa Tempat tidak di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas pemerintahan yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp.200.000.000 Sewa Gedung dan Rp.800.000.000 Belanja Promosi dan Publikasi di media TV lokal);
24. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pada tolok ukur kegiatan Village STBM Activities di kawasan wisata Provinsi Banten, kawasan wisata Banten lama dan kampanye CTPS belanja cetak tidak dilaksanakan dikarenakan media promosi yang akan digunakan masih tersedia. Pada kegiatan dukungan Health City Summit terdapat efisiensi pada belanja penginapan disesuaikan dengan jumlah peserta yang telah terkonfirmasi akan menginap pada kegiatan dimaksud. Efisiensi pada belanja narasumber disesuaikan dengan kehadiran narasumber;
25. Sistem Informasi Manajemen RS, keuangan 18,92% sisa realisasi Rp.341.800,- di sebabkan karena efisiensi kegiatan;
26. Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten; dengan capaian fisik 91,62% hal ini disebabkan rehabilitasi gedung CSSD tidak selesai maka belanja alat kesehatan (CSSD) tidak di realisasikan Rp.6.190.250.497,- ;
27. Kegiatan Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten di sebabkan Belanja Makan Minum Pasien untuk Gedung baru tidak di realisasikan, karena gedung baru belum beroperasi;
28. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD yang dilaksanakan RSUD Banten, Sisa realisasi keuangan 22,73% di sebabkan karena sesuai dengan kebutuhan penganggaran kenyataannya, juga di sebabkan karena adanya perinsip kehati hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya.
29. Kegiatan Surveilans. Imunisasi dan Krisis Kesehatan pada tolok ukur Penguatan imunisasi rutin, honor KOMDA KIPi terdapat sisa anggaran

dikarenakan untuk PNS tidak diperbolehkan mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan pasca imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas KAB/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon adanya perlengkapan KLB yang tidak diserap dikarenakan masih tersedianya stok perlengkapan KLB;

30. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada pemilihan tenaga kesehatan teladan Tk Provinsi Banten belanja hadiah tidak direalisasikan, Efisiensi pada Rekrutmen dan pembekalan tenaga kesehatan penugasan khusus dimana belanja psikotes lebih rendah dari alokasi pagu anggaran, Pada pelatihan fungsional bidang kesehatan terdapat efisiesi belanja pengiriman peserta pelatihan disesuaikan dengan PNBK.

b). Solusi

1. Berdasarkan Pergub No.19 tahun 2018 tentang SOTK UPTD dan KCD terhadap kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, bahwa BKKM di hilangkan sehingga tidak dianggarkan di tahun berikutnya;
2. Perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi existing yang ada
3. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping, yaitu dalam perencanaan anggaran akan lebih dimatangkan lagi untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan pada anggaran perubahan;
4. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping melakukan pengawasan terhadap penyedia yang mengerjakan pekerjaan tersebut untuk mengetahui kesesuaian antara penyerapan belanja dengan yang dibelanjakan dilapangan. Pada Januari 2019 dilakukan kegiatan probity Audit perencanaan dan penyusunan HPS oleh Tim Satgas Akuntabilitas Keuangan Daerah (BPKP) untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2019;
5. Solusinya pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang dilaksanakan RSUD Malingping adalah akan berkoordinasi dahulu dengan bagian kepegawaian dan keperawatn untuk SDM orang-orang yang telah dilatih dan belum terlatih sebelum menyusun anggaran

- tahun selanjutnya dan membagi antara Pegawai Non PNS dan Pegawai PNS;
6. Rencana akan dianggarkan kembali pada APBD-P Tahun 2019 terkait lelang genset pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Banten;
 7. Solusinya dari Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping adalah dalam perencanaan anggaran akan lebih dimatangkan lagi;
 8. Solusinya pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) harus dilakukan :
 - Koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar pembayaran Klaim dapat dibayarkan tepat waktu;
 - Pemerintah pusat harus segera memberikan luncuran dana kepada BPJS yang mengalami kesulitan keuangan (Defisit) agar segera membayar tagihan Rumah Sakit sehingga realisasi pendapatan tercapai;
 - Sesuai hasil koordinasi dengan BPKAD disarankan RSUD Malingping bersurat kepada Gubernur untuk meminta ijin persetujuan penggunaan surplus oleh Gubernur (Permendagri No.79 tahun 2018 tentang BLUD bahwa surplus harus masuk kedalam DPA BLUD).
 9. Untuk belanja promosi dan publikasi pada Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bayarkan sesuai arahan BPKP dan perencanaan penganggaran di tahun berikutnya di sesuaikan dengan HPS;
 10. Pembelian Alat kesehatan untuk gedung CSSD pada Kegiatan Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten dianggarkan pada Tahun 2020;
 11. Solusi dari Kegiatan Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten yaitu Operasional Gedung baru Pada Tahun 2019, didukung penganggaran Makan - minum pasien yang sudah di alokasikan pada DPA 2019.
 12. Tolok ukur Penguatan imunisasi rutin pada perencanaan penganggaran berikutnya di jadikan sub tolok ukur kegiatan;
 13. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bagus dalam pelaksanaan karena fisik 100% dengan adanya efisiensi.

2.2.1.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 83 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.074.816.380.000,- dan realisasi sebesar Rp902.744.595.522,- atau sebesar 83,99% dengan realisasi fisik sebesar 90,83%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terkendala pada pengadaan lift oleh pihak kedua tidak bisa melaksanakan sehingga putus kontrak (penyedia tidak mampu mendatangkan barang) sudah ada sanksi dan ada efisiensi terkait pengadaan meubeler
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak mencapai target disebabkan:
 - Adanya pengadaan sarana dan prasarana yang baru sehingga masih belum memerlukan banyak perawatan;
 - Anggaran tidak terserap optimal karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan, adanya alat berat yang dimutasikan ke Balai, belanja internet sudah diakomodir di Diskominfo, efisiensi penggunaan alat listrik hemat energi, putus kontrak pada belanja pakaian Korpri, belanja jasa kebersihan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kontrak selama 7 bulan.
3. Anggaran pengadaan lahan kebinamargaan di beberapa lokasi masih belum terserap/terrealisasi sesuai yang direncanakan dan hanya 4 (empat) lokasi yang dapat diselesaikan sesuai target. Adapun kendala dalam pengadaan lahan yaitu:
 - Banyak tanah negara (irigasi) yang diklaim milik warga, sehingga tahapan pengumpulan alas hak terkendala validasi yaitu pembebasan Lahan untuk Jembatan Sibaya, Kemayungan I,

Sukajaya, Jembatan Kemayungan II/Ciurang dan Jembatan Margaluyu di ruas jalan Banten Lama – Pontang seluas 1500 m² belum dapat direalisasikan;

- Pemilik lahan tidak menerima besaran nilai penggantian. Kendala ini dihadapi pada pembebasan Lahan untuk Jalan Pakupatan – Palima, Pengadaan Lahan Ruas Jalan Gunung Sari-Mancak-Anyer (Simpang Geometrik Gunung Sari dan Pembebasan Lahan Untuk Sp. Gondrong-Hasyim Ashari;
 - Proses pengadaan tanah masih dalam Proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan pada Pembebasan Lahan Untuk Sp. Kaligandu (Ayip Usman, Pembebasan Lahan Untuk Jalan Ruas Palima-Baros, Pengadaan Lahan Ruas Cikeusal - Boru (Pendukung Akses Tol Serang Panimbang) dan Pembebasan Lahan Untuk Relokasi jalan Tonjong - Banten Lama;
 - Belum adanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 Tahun 2012. Karena belum adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah, pengadaan lahan pada 2 (dua) lokasi tidak dilaksanakan yaitu Pengadaan Lahan Sp.Tidak Sebidang Jombang Raya (under pass ciputat) dan Pembebasan Lahan Untuk Sp. Muncul-Ruas Pajajaran-Pamulang-Otista (Batas DKI);
 - Pemilik tanah tidak setuju dengan luasan yang akan dibebaskan pada Pengadaan Lahan Akses Pendekat Jembatan Kedaung;
 - Terlambatnya Peta bidang dari BPN sebagai syarat pembayaran pada Pembebasan Lahan untuk Jalan Sempu - Dukuh Kawung dan Pembebasan Lahan untuk Jalan Palima - Ps. Teneng.
4. Pada kegiatan Penatagunaan Sumber Daya Air terdapat anggaran pembebasan lahan Sindangheula. Pekerjaan ini belum dapat diselesaikan ditahun anggaran 2018. Rencana pembebasan 219 bidang tanah seluas 438.965 m², baru terealisasi 107 bidang tanah yang dibebaskan seluas 235.435 m² dan masih ada sisa 112 bidang tanah yang belum dibebaskan dengan luas 203.530 M². Untuk pembebasan lahan sebanyak 112 bidang sedang tahap proses

penitipan dipengadilan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembebasan 112 bidang lahan antara lain:

- Adanya sengketa kepemilikan, berperkara di pengadilan, menolak bentuk/besarnya ganti kerugian, menjadi jaminan di bank dan ketidakhadiran pada waktu sosialisasi pembebasan lahan.
 - Terdapat tanah kas desa, tanah wakaf, aset pemerintah kabupaten dan tanah Negara sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang.
5. Pada kegiatan Pembangunan Jembatan progres fisik dan penyerapan anggaran belum sesuai target dikarenakan permasalahan sebagai berikut:
- Pembangunan Jembatan Pendekat Jembatan Kedaung sisi Kota Tangerang tidak dilaksanakan karena lahan oprit sisi kota tangerang belum dibebaskan
 - Adanya pemutusan kontrak pada Pembangunan Jembatan Cibeureum (Penghubung Serang-Tangerang) yang disebabkan sampai akhir kontrak, penyedia jasa belum dapat menyelesaikan struktur atas jembatan dan bangunan pelengkap.
 - Belum selesai pekerjaan lantai jembatan (struktur atas jembatan) pada Pembangunan Jembatan Ciliman (Ruas Saketi-Malingping).

b). Solusi

Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan tersebut, meliputi :

1. Berkaitan dengan permasalahan pengadaan Lahan kebinamargaan solusi yang akan dilakukan yaitu:
 - Koordinasi lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai;
 - Untuk warga yang menolak harga appraisal maka akan dilakukan appraisal ulang pada beberapa ruas jalan;
 - Melanjutkan tahapan pembebasan lahan pada tahun anggaran 2019;
 - Merubah dokumen perencanaan teknis jalan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah.
2. Berkaitan dengan pengadaan lahan Sindangheula, pada tahun anggaran 2019 Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air DPUPR Provinsi Banten akan terus berkoordinasi dengan pihak Pengadilan;

3. Berkaitan dengan pembangunan jembatan solusi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pembebasan lahan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dan pekerjaan fisik jalan pendekat jembatan kedaung sisi kota tangerang pada kegiatan pembangunan jalan wilayah utara;
 - Pembangunan jembatan Cibeureum akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2019 dengan diawali lelang untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Pembangunan Jembatan Ciliman (Ruas Saketi-Malingping) akan dilanjutkan oleh UPT Lebak pada tahun anggaran 2019.
4. Untuk mengurangi kendala non teknis dilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus melibatkan semua stakeholder yang terkait sejak dalam proses perencanaan. (warga sekitar, pemilik tanah, pihak kelurahan, pihak kecamatan dll). Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi mengenai maksud, tujuan, manfaat dari suatu pekerjaan sehingga semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama.

2.2.1.4 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp428.241.570.000,- dan realisasi sebesar Rp401.532.470.178,- atau sebesar 93,76% dengan realisasi fisik sebesar 99,78%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat Sisa Belanja Operasional Kantor tidak Tetap, Penyediaan Barang Habis Pakai, Bahan Cetak, Makan dan Minum Kantor, Operasional Jasa Kantor, Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo, Penyediaan BBM,

- Promosi dan Publikasi, dokumentasi serta sisa kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat sisa Belanja Penggandaan, Jasa Narasumber / Instruktur, dan Perlengkapan Peserta/Panitia;
 3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
 4. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan Efisiensi dari penggandaan dokumen kearsipan serta efisiensi dari belanja narasumber pendampingan untuk kearsipan, dan Sisa Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD;
 5. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B adanya efisiensi dari belanja pemeliharaan kendaraan;
 6. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan terdapat sisa belanja pada tolok ukur Peningkatan dan Sosialisasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang dan Belanja Jasa Pendampingan;
 7. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh terdapat sisa Kontrak Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kab. Serang dan Provinsi Banten;
 8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan terdapat sisa Belanja Pengadaan Lahan Untuk Relokasi program pembangunan provinsi, Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi Adanya Program Pembangunan Provinsi, Bank Tanah (Land Banking) Pengembangan Pembangunan Perumahan, Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah {SHAT} MBR;
 9. Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana KP3B terdapat sisa Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan KP3B, Sisa pembayaran Rekening Listrik KP3B (Fasilitas Umum dan Gedung SKPD Terpadu), sisa belanja Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan/ pengawasan, Sisa Penataan Instalasi Listrik dan Lampu KP3B, Penataan Masjid Raya Al Bantani KP3B, Pengadaan Mobil Crane Tiang Listrik dan Pohon, Penataan Plaza Aspirasi KP3B, Pembangunan

- Kawasan Komersil KP3B, Pembangunan Masjid Kecil KP3B, Pembangunan Workshop Dinas Perkim;
10. Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi terdapat sisa kontrak Pembangunan sarana prasarana infrastruktur kawasan strategis, Penataan Banten Lama, Sport Centre;
 11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih terdapat sisa Belanja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis, Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan, Bimbingan Teknis Pengembangan SPAM, Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja penggandaan;
 12. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi terdapat sisa belanja Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis, Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan, Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja penggandaan;
 13. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya terdapat sisa Belanja penggandaan, dan belum ada penyerahan aset secara tertulis dari kabupaten ke provinsi;
 14. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman terdapat sisa Belanja Jasa Konsultansi perencanaan (terutama DED penataan infrastruktur sarana prasarana lainnya pada kawasan strategis Kab lebak & Padeglang), Pengawasan (terutama Tambahan pengawasan tambahan pengawasan pemb. Gedung baru), sisa belanja cetak, penggandaan, terutama pendukung Penyusunan juknis ahsp bidang perumahan, permukiman dan ck di provinsi banten, Pelatihan manajemen quality control perencanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman.

b). Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut diatas yaitu harus lebih cermat serta teliti dalam Perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

2.2.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 12 program

dan 51 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp39.129.970.000,- dan realisasi sebesar Rp36.026.048.199,- atau sebesar 92,07% dengan realisasi fisik sebesar 99,97%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, adalah:

Satuan Polisi Pamong Praja

a). Permasalahan

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah terkendala pada Jabatan Fungsional Satpol-PP belum terakomodir di tahun 2018 (36 orang);
2. Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Tolok Ukur Cipta Kondisi Pemeliharaan Cagar Budaya Kesultanan Banten Lama tidak dianggarkan di tahun 2018, merupakan kegiatan Tematik Pembangunan Kawasan Banten Lama.
3. Kegiatan Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disebabkan MoU antara Provinsi Jabar-DKI Jakarta- Provinsi Banten sudah habis masa berlakunya (Tahun 2016). MoU antar OPD di lintas Daerah.

b). Solusi

1. Tindaklanjut di tahun 2019 sudah dianggarkan sebesar 250 juta, anggaran ini belum optimal karena belum mencakup semua yg diperlukan/dibutuhkan.
2. Tindak Lanjut sesuai PP 28 Tahun 2018 MoU oleh Kepala Daerah sedangkan yang Kerjasamanya oleh Kepala OPD disetiap daerah masing-masing yang menanganinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a). Permasalahan

1. Keterlambatan Penyelesaian Administrasi Keuangan (SPJ) dari program kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli, dikarenakan

keterlambatan penyelesaian Dokumen Kontrak maupun Administrasi lainnya;

2. Pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor disebabkan efisiensi sisa kontrak pelaksanaan pekerjaan pembuatan ruang auditorium/teater;
3. Adanya kekeliruan dalam pengimputan RKA Perubahan 2018, Anggaran telah diserap dan di SPJ-kan namun di Perubahan Pagu anggaran tersebut terhapus;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur disebabkan adanya kesalahan pada perencanaan untuk keg. Outbond yang seharusnya 8 hari menjadi 3 hari;
5. Adanya Keterlambatan penetapan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten sebagai Pengguna Anggaran, sehingga tidak dapat dilaksanakannya Program dan Kegiatan pada bulan Agustus dan September 2018;
6. Keterlambatan Pengesahan Pagu Anggaran Perubahan 2018, sehingga program kegiatan yang sudah terjadwal di minggu ke-1 dan ke-2 bulan Oktober belum bisa dilaksanakan;
7. Dalam Program Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kesulitan mendapat Dokumen pendukung dari masing masing Bidang terkait untuk penyusunan sebuah Dokumen Laporan, baik Laporan Bulanan (LAPBUL, BARJAS, TEPPRA), maupun Laporan Akhir Tahun (LAKIP, LKPP, LPPD, LKPD) hal ini menghambat terhadap kelancaran penyusunan Laporan.

b). Solusi

1. Segera melakukan perbaikan dan Penyelesaian terhadap Administrasi dimaksud dengan tidak terlepas koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Banten;
2. Dilakukan Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah sebesar Rp18.780.000.- pada bulan Desember 2018;
3. Melakukan penjadwalan ulang terhadap program kegiatan pada Triwulan III bulan Agustus – September 2018, dilaksanakan pada Triwulan IV Oktober – Desember 2018;
4. Dilakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan dimaksud dan dilaksanakan pada minggu ke-3 dan ke-4 bulan Oktober;

5. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan bidang, serta mengusulkan kepada Pimpinan untuk mengingatkan PPTK dan pejabat di atasnya, supaya memberikan arsip Laporan pelaksanaan Program Kegiatan dari bidang serta dokumen dokumen yang diperlukan untuk penyusunan Laporan BPBD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a). Permasalahan

Permasalahan pada kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada disebabkan Domlak APBD TA. 2018 untuk Fullboard tidak boleh dilaksanakan. Ada satu tolok ukur dua sub tolok ukur yang tidak dilaksanakan.

b). Solusi

Kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada tidak dilaksanakan dan sisa anggaran yang tidak diserap disilpakan.

2.2.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung oleh 7 program dan 32 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp33.476.240.000,- dan realisasi sebesar Rp32.533.179.442,- atau sebesar 97,18% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terdapat Tolok Ukur Rehabilitasi Sosial Anak dengan Sub Tolok Ukur Penanganan Kedaruratan Anak sebesar Rp150.000.000,- dan Tolok Ukur Rehabilitasi Sosial lanjut Usia dengan Sub Tolok Ukur Hari Lanjut Usia Nasional Tk. Provinsi Banten sebesar Rp42.000.000,- tidak dapat dicairkan karena Kesalahan kode rekening yang seharusnya berupa barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat tetapi pada DPA berupa uang;
2. Pada Kegiatan Kepahlawanan, keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS) terdapat Tolok Ukur

Bimbingan Peningkatan dan Pengembangan Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS) Melalui Guru sebesar Rp33.000.000,- yang tidak dapat diserap karena kegiatan tersebut dialihkan ke Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Serta Tolok Ukur Peringatan Hari Pahlawan 10 November sebesar Rp50.869.000,- yang rencananya akan diselenggarakan di dua lokasi hanya dilaksanakan di satu lokasi yaitu Taman Makan Pahlawan Ciceri;

3. Pada Kegiatan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat terdapat Tolok Ukur Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Sub Tolok Ukur Seleksi Penerima Padmamitra Award Tingkat Provinsi sebesar Rp8.250.000,- dan Tolok Ukur Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) sebesar Rp11.150.000,- keduanya pada kode rekening Belanja Perlengkapan Peserta, Sewa Mobilitas Darat tidak dapat diserap karena kegiatan berlangsung on the spot dan menggunakan mobil dinas;
4. Pada beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi anggaran.

b). Solusi

1. Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2019 lebih di pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan anggaran terutama pada Belanja Tidak Langsung yang menjadi penyumbang terbesar SILPA;
2. Dalam proses perencanaan kegiatan agar lebih teliti dan jeli menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan rincian per tolok ukur agar tidak ada kegiatan yang tidak terserap;
3. Dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yang valid dan terukur.

2.2.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan 17 Urusan Bidang, 44 program dan 272 kegiatan yang tersebar di 13 (tiga belas) Perangkat Daerah, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas

Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp290.486.048.000,- dan realisasi sebesar Rp268.961.392.283,- atau sebesar 92,59% dengan realisasi fisik sebesar 98,33%. Adapun Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

2.2.2.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan didukung oleh 6 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp38.291.360.000,- dan realisasi sebesar Rp35.251.359.663,- atau sebesar 92,06% dengan realisasi fisik sebesar 99.33%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian realisasi keuangan tidak terserap seluruhnya, hal ini disebabkan karena efesiensi kontrak dan efesiensi belanja makan dan minum, efesiensi sewa fasilitas kamar/ruang, efesiensi uang saku, efesiensi transportasi perjalanan dinas, efesiensi narasumber, dan lain-lain. Solusi agar semua pihak terkait pengelolaan program dan kegiatan yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi, baik dari koordinator PPTK, PPTK, pelaksana administrasi dan pelaksana teknis;
2. Pada kegiatan Pengembangan dan Pemasaran BLKI Provinsi Banten rata-rata dari lima tolok ukur kegiatan tidak terserap terkait uang saku peserta, efesiensi SPK, partisipasi *Job Fair* yang kebetulan tahun 2018

tidak dapat dilaksanakan, karena adanya penerimaan calon tenaga kerja melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam perekrutan. Seleksi yang diadakan di beberapa OPD, seperti: Bappeda, Inspektorat, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, Pendopo SETDA Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan beberapa tempat di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab/Kota.

b). Solusi

1. Koordinator PPTK, PPTK, pelaksana administrasi dan pelaksana teknis perlu kemampuan untuk memahami permasalahan secara detail terkait program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga permasalahan dimasa akan datang tidak dapat terulang lagi;
2. Perlu adanya konsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan pengendalian diinternal OPD maupun dilingkup. Pemerintah Provinsi Banten.

2.2.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp23.303.456.800,- dan realisasi sebesar Rp21.499.862.487,- atau sebesar 92,26% dengan realisasi fisik sebesar 99,63%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Sisa Anggaran terkait dengan Pengadaan Personal Komputer sebanyak 2 unit pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, disebabkan terdapat kenaikan harga satuan barang setelah ditetapkannnya DPPA Tahun Anggaran 2018;

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, terdapat kesalahan kode rekening alat perlengkapan kantor masih teranggarkannya pemeliharaan kendaraan operasional dalam tahap proses penghapusan;
3. Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, antara lain :
 - Pada kode rekening makan minum kegiatan di serap menyesuaikan usulan kegiatan teknis bidang;
 - Anggaran untuk stan banten expo terdapat silpa;
 - Belanja jasa pemasangan tv cabel tidak terserap serap, karena adanya kendala teknis.
4. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah, disebabkan adanya penyesuaian usulan kegiatan Bidang;
5. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan terdapat Efisiensi Nilai kontrak, efisiensi belanja narasumber karena di sesuaikan dengan kebutuhan;
6. Pada tolok ukur kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, kegiatan Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK, Penyediaan BBM, disebabkan karena PPTK tidak memperhatikan catatan atas kepemilikan asset/barang yang dikuasai oleh SKPD dan tidak melakukan revisi target pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018;
7. Tolok ukur kegiatan Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten, kegiatan Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui Rapat Kinerja Teknis Pengurus, kegiatan Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak nasional (FAN), kegiatan Bimtek ADB, kegiatan Rakor Pengelolaan SIAK, kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office), dan kegiatan Bimbingan Teknis PIAK, hal tersebut disebabkan karena PPTK tidak menyesuaikan dengan target kinerja output yang telah dihapus pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018;
8. Secara umum, permasalahan dalam penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten meliputi :

- Penjadwalan dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tidak diikuti dengan proses persiapan yang cukup sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Penetapan target sasaran, baik peserta, narasumber maupun moderator tidak cukup tergambarkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan.

b). Solusi

Solusi untuk mengurangi tingginya anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan diantaranya :

1. Menetapkan target sasaran yang jelas dan tergambar secara utuh dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
2. Menyusun ROK yang menggambarkan secara detail kebutuhan anggaran serta tahapan proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
3. Usulan anggaran agar dapat menyesuaikan kebutuhan dan sesuai domlak APBD
4. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
5. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
6. Meningkatkan kapasitas personil pelaksana dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran.

2.2.2.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp10.792.690.000,- dan realisasi sebesar Rp9.899.763.720,- atau sebesar 91,73% dengan realisasi fisik sebesar 99,94%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat sisa anggaran sebesar 8,27% dari pagu anggaran, hal ini diakibatkan adanya efisiensi belanja dan sisa kontrak;
2. Permasalahan umum terkait kegiatan pada urusan Wajib non Pelayanan Dasar, meliputi:
 - a) Ketersediaan Pangan :
 - Kebutuhan pangan terus meningkat;
 - Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
 - Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
 - Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan.
 - b) Kerawanan pangan merupakan ancaman bagi ketahanan pangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, timpangnya tingkat penghasilan, pengangguran, kemiskinan serta kondisi geografis wilayah Banten sangat rawan terjadinya bencana alam, seperti gempa, banjir, dan longsor yang dapat berakibat pada kerawanan pangan pada masyarakat.
 - c) Konsumsi dan keamanan pangan, permasalahannya antara lain:
 - Masih rendahnya kesadaran para pengusaha waralaba (ritel) untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;
 - Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
 - Standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar dari pelaku usaha dan PSAT diperedaran belum jelas diterapkan, sehingga belum terjamin keamanan pangannya untuk dikonsumsi masyarakat; dan
 - Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar serta koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.
 - d) Permasalahan di bidang distribusi pangan antara lain :
 - Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut;

- Terjadinya fluktuasi harga pangan, yang ditunjukkan oleh *Coefficient Of Variation* (CV), yang berakibat pada inflasi.

b). Solusi

1. Solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada kegiatan (belanja langsung), akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Pengumuman lelang melalui sistem umum rencana pengadaan (SIRUP) dilakukan lebih awal.
 - Penetapan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan/penetapan PPTK lebih cepat.
 - Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jadwal pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang sudah ditetapkan.
2. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa mengenai ketersediaan, penanganan daerah rawan pangan, di Provinsi Banten akan terus dimaksimalkan.
3. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa mengenai konsumsi dan keamanan pangan di Provinsi Banten akan terus dioptimalkan.
4. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa mengenai distribusi pangan di Provinsi Banten akan terus dioptimalkan.
5. Upaya-upaya pembinaan terhadap organisasi/kelembagaan petani/poktan/gapoktan/PUPM/LDPM (pelaku usaha/pelaku utama) yang tidak hanya dominan sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi organisasi/kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan.

2.2.2.4 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program dan 37 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp19.759.778.000,- dan realisasi sebesar Rp18.862.450.762,- atau sebesar 95,46% dengan realisasi fisik sebesar 99,82%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon diakibatkan kesalahan kode rekening untuk sewa gedung;
2. Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaan kegiatannya;
3. Masih minimnya tenaga pengadministrasian umum sehingga menghambat proses pelaksanaan pengadmisnistrasian kegiatan (SPJ) pada beberapa kegiatan;
4. Masih adanya proses penataan/pelimpahan asset dinas ke beberapa OPD lain yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap serapan anggaran kegiatan terkait;
5. Adanya efisiensi anggaran diperubahan anggaran yang berpengaruh terhadap serapan anggaran;
6. Masih terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.

b). Solusi

1. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak ketiga);
2. Perlunya upaya peningkatan sumberdaya manusia khususnya tenaga administrasi umum di beberapa sub bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Peningkatan upaya penyelesaian administrasi pelimpahan asset dinas;
4. Meminimalisir terjadinya efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan proses perencanaan anggaran yang lebih baik;
5. Dalam pelaksanaan kegiatan kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu memperhatikan Rencana Operasional Kegiatan atau (ROK).

2.2.2.5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.807.906.200,- dan realisasi sebesar Rp1.565.127.131,- atau sebesar 86,57% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK) terdapat efisiensi uang saku peserta 16 juta, perlengkapan peserta dan narsum, serta SPPD;
2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) disebabkan dalam pedoman pelaksanaan APBD perjalanan Dinas kunjungan kerja maksimal 2 kali.

b). Solusi.

Solusi yang dapat dilakukan kedepan dalam proses Perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya lebih cermat dan telit sesuai peraturan yang berlaku.

2.2.2.6 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 4 program dan 20 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.958.950.000,- dan realisasi sebesar Rp12.199.977.904,- atau sebesar 81,56% dengan realisasi fisik sebesar 97,96%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, disebabkan karena beberapa kendala diantaranya :

1. Program-program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sehingga pengukuran kinerja Program kegiatan sulit diukur;
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebesar (74,22%), hal ini disebabkan adanya rapat-rapat fasilitasi kegiatan PKK yang tidak jadi dilaksanakan sehingga menimbulkan efisiensi anggaran pada rekening belanja makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp.507.426.550,-;
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, disebabkan karena Tolok Ukur Penataan dan Pemanfaatan Hasil Teknologi Tepat Guna, dikarenakan pada kegiatan tentang Tingkat Nasional di Provinsi Bali, Kab. Lebak dan Kota Tangerang tidak ikut serta pada Even ini sehingga stand yang semula direncanakan sebanyak 15 hanya terealisasi 10 stand, hal ini berdampak pada penyerapan anggaran Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Sewa Tenda dan Belanja Dekorasi;
4. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat disebabkan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sebesar (79,30%), terdapat efisiensi anggaran dari Belanja Perlengkapan Peserta, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan dan Belanja Uang Saku;
5. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, Progres Realisasi Keuangan hanya mencapai 75,25% hal ini disebabkan karena Tolok Ukur Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dari 6 titik lokasi yang dianggarkan hanya 4 titik lokasi yang dilaksanakan, karena 2 Kota yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang tidak melaksanakan Kegiatan BBGRM;
6. Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan, Progres Realisasi Keuangan hanya

mencapai 87,85%, hal ini disebabkan karena Tolok Ukur Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan, karena terdapat 2 (dua) OPD yang melaksanakan Lomba Desa/Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Lomba Desa, sedangkan Lomba Kelurahan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;

7. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa Progres Realisasi Fisik hanya mencapai 86,65% dan Realisasi Keuangan hanya mencapai 27,00%, hal ini disebabkan antara lain :

- Tolok Ukur Penyusunan Profil BKAD, tidak dapat diserap, karena pada batas akhir pengajuan anggaran, Output atau hasil dari Penyusunan Profil BKAD tersebut belum ada.
- Terdapat Efisiensi Anggaran pada 2 Tolok Ukur lainnya, seperti Sewa Tenda, Kursi, Ac dan lainnya.

b). Solusi.

Pemecahan masalah tersebut, antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Mengajukan Revisi SOTK kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Banten, agar Penempatan Pejabat Eselon IV disesuaikan dengan Nama Bidang dan Program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappeda dan Biro Organisasi terkait Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan, apakah kewenangan Dinas Teknis atau Biro;
3. Harus dilakukan koordinasi dengan Kab/kota agar di tahun selanjutnya dapat mengirimkan peserta lomba tentang tingkat Nasional, dan sangat mengharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota serta dukungan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah anggaran, sehingga alat-alat tentang ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui sosialisasi, pelatihan dan penguatan kelembagaan posyantek dan warung telekomunikasi desa sebagai pusat pengembangan dan penguatan teknologi di pedesaan;
4. Proses Perencanaan Penganggaran tahun berikutnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;

5. Tolok Ukur Penyusunan Profil BKAD pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa dianggarkan kembali ditahun 2019 dengan priede profil 2018 dan 2019.

2.2.2.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.801.467.000,- dan realisasi sebesar Rp1.746.069.800,- atau sebesar 96,92% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2.2.2.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan didukung oleh 6 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.680.000.000,- dan realisasi sebesar Rp47.454.983.877,- atau sebesar 95,52% dengan realisasi fisik sebesar 98,83%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor terdapat efisiensi dari belanja barang/jasa;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat efisiensi dari pengiriman peserta diklat yang tadinya 5 menjadi 4 orang untuk diklat penguji kendaraan bermotor;
3. Terdapat tolok ukur yang tidak dilaksanakan;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berketrampilan Khusus (kompeten);
5. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;

6. Keterlambatan dalam proses pencairan keuangan akibat dari proses pergantian pimpinan.

b). Solusi

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, antara lain:

1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait dari mulai perencanaan anggaran hingga pelaporan;
2. Menyusun program, kegiatan dan penganggaran secara tepat, akurat dan skala prioritas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan, serta diperlukan perencanaan yang matang, terukur, terjadwal.

2.2.2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp36.656.339.000,- dan realisasi sebesar Rp34.940.521.425,- atau sebesar 95,32% dengan realisasi fisik sebesar 97,94%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang tidak dilaksanakan yaitu terkait pengiriman diklat aparatur, tidak terlaksana dikarenakan dikarenakan jadwal pelaksanaan diklat berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Internal. Sehingga tidak dapat dilakukan pengiriman peserta diklat;
2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah disebabkan penyerapan menyesuaikan dengan kebutuhan;
3. Kegiatan Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika terdapat adanya efisiensi dari honorarium narasumber serta alokasi tenaga ahli untuk pengintegrasian aplikasi simral dan aplikasi SIRUP tidak dapat direalisasikan karena adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Riset

Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Banten, adanya efisiensi dari Tenaga Ahli Security System Pada kegiatan Maintenance Website.

b). Solusi

1. Harus dilaksanakan di awal tahun, sehingga pemilihan aparatur aparatur yg dikirim lebih tepat sasaran sesuai dengan Tupoksi;
2. Untuk lebih selektif dalam penganggaran terkait kegiatan perjalanan dinas;
3. Kegiatan Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika tidak menganggarkan honorarium untuk BPPT, dikarenakan adanya Perjanjian Kerjasama (merasionalisasikan pola penganggaran).

2.2.2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 25 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.463.680.000,- dan realisasi sebesar Rp13.760.722.087,- atau sebesar 88,99% dengan realisasi fisik sebesar 96,02%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor tidak dapat serap sepenuhnya dikarenakan gagal lelang pengadaan mobil promosi KUKM pada anggaran perubahan karena tidak ada peminat;
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop terdapat efisiensi karena fosemajure.

b). Solusi

1. Agar proses lelang diajukan agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga proses lelang tersebut menjadi optimal dan tepat waktu;

2. Agar PPTK lebih teliti dalam penyusunan anggaran kegiatan.

2.2.2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.463.830.000,- dan realisasi sebesar Rp13.373.232.982,- atau sebesar 92,46% dengan realisasi fisik sebesar 99,03%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat efisiensi terhadap kebutuhan pemeliharaan kendaraan (suku cadang) tidak diserap dikarenakan kondisi kendaraan masih bagus, komputer terawat dan tidak perlu ganti *hardware*;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat Pembatalan Pengiriman pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi karena tidak ada even atau kegiatan peningkatan kompetensi penanaman modal, sehingga terjadi efisiensi Anggaran;
3. Kebijakan pelaksanaan kegiatan/rapat harus menggunakan fasilitas pemerintah daerah, sehingga Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dalam rangka penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal terhambat;
4. Terkendalanya koordinasi penyusunan DED untuk pengadaan bangunan genset dengan dinas teknis terkait;
5. Kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal terdapat efisiensi honorarium narasumber dan perlengkapan peserta.

b). Solusi

1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan;
3. Mempersiapkan dokumen pendukung lelang lebih awal;

4. Mengusulkan pengecualian untuk Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dalam rangka penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal agar dapat dilaksanakan diluar fasilitas pemerintah daerah.

2.2.2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp34.977.610.000,- dan realisasi sebesar Rp33.032.699.159,- atau sebesar 94,44% dengan realisasi fisik sebesar 99,94%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, terkendala pada perencanaan, ada event dari pusat tapi pada perjalanannya ada yang di biyai dari pusat dan ada juga yang tidak jadi dilaksanakan baik di dalam maupun di luar daerah, diantaranya:
 - Pendampingan atlet pada kejurnas Karate yang akan dilaksanakan di Lombok namun karena ada bencana gempa bumi di Lombok sehingga di batalkan.
 - Kemudian Pendampingan atlet di Medan ada Kejurnas Takraw batal diikuti karena atlet dan pelatihnya mengikuti Asian Games. pelaksanaan Kerjurnas ini bersamaan dengan penyelenggaraan Asian Games.
2. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, terdapat efisiensi pada Belanja Tenaga Ahli IT yang tidak bisa di realisasikan karena sudah teranggarkan di Diskominfo;

3. Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO di efisiensi karena sampai dengan APBD-P Tahun 2018 belum ada SK penetapan lahan guna pembangunan SKO.
- b). Solusi
1. Diharapkan kedepan akan dilakukan lebih selektif dalam penganggaran;
 2. Tidak akan di alokasikan kembali untuk belanja tenaga ahli pada kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral karena sudah menjadi kewenangna Diskominfo;
 3. Akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait Sekolah Khusus Olahraga.

2.2.2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp824.041.000,- dan realisasi sebesar Rp640.101.000,- atau sebesar 77,68% dengan realisasi fisik sebesar 90,98%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik, adalah:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a). Permasalahan

1. Fasilitas Sekretariat Bersama Banten Lama, namun dikarenakan kondisi teknis dilokasi tidak memungkinkan, maka sub tolok ukur ini tidak dapat dilaksanakan.
2. Rencana Induk Kawasan Banten Lama, sub tolok ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.
3. Visualisasi Revitalisasi Kawasan Banten Lama sub tolok ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

b). Solusi

Solusi untuk permasalahan tersebut kedepan agar lebih meningkatkan kecermatan dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan

kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga output kegiatan dapat tercapai.

2.2.2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp539.460.000,- dan realisasi sebesar Rp491.345.000,- atau sebesar 91,08% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2.2.2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan didukung oleh 3 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp11.711.500.000,- dan realisasi sebesar Rp9.597.071.293,- atau sebesar 81,95% dengan realisasi fisik sebesar 94,53%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Kegiatan-kegiatan dibidang kebudayaan terkait anggaran yang tidak terserap antara lain dikarenakan adanya efesiensi kontrak, belanja jasa narasumber dan uang saku peserta.

b). Solusi

Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2.2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp13.609.800.000,- dan realisasi sebesar

Rp12.877.753.493,- atau sebesar 94,62% dengan realisasi fisik sebesar 97,75%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Perencanaan anggaran tidak matang menyebabkan anggaran harus direvisi/menunggu perubahan anggaran, hal ini tentunya menjadikan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi tidak efisien.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan pada sub tolok ukur penyusunan pergub jadwal retensi arsip Substantif untuk 11 urusan pemerintah daerah belum dapat diselesaikan dikarenakan surat rekomendasi dari Kepala Arsip Nasional (ANRI) terkait draft Pergub tersebut baru turun pada pertengahan desember 2018 sehingga tidak cukup waktu untuk memprosesnya kedalam Pergub, namun draft Pergub tersebut saat ini sudah ada di Biro Hukum untuk selanjutnya diproses menjadi Pergub pada tahun 2019;
3. Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan pada sub tolok ukur pengadaan koleksi Banten Corner dibatalkan penyerapannya dikarenakan pihak ke tiga tidak mampu memenuhi kriteria koleksi sebagaimana dalam ketentuan, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas koleksi Banten Corner dan mengurangi inefisiensi akibat barang yang tidak sesuai spesifikasi.

b). Solusi

1. Pengadaan diklat pelatihan, sosialisasi yang terus menerus baik perencanaan maupun keuangan diperlukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola APBD di Provinsi Banten;
2. Koordinasi yang intensif dengan Biro Hukum agar Pergub Jadwal Retensi Arsip Substantif 11 urusan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan tepat waktu;
3. Lebih ketat lagi dalam proses penunjukan pihak ketiga pada sub tolok ukur pengadaan koleksi Banten Corner, agar ke depan tidak terjadi lagi kejadian serupa.

2.2.2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.844.180.000,- dan realisasi sebesar Rp1.768.350.500,- atau sebesar 95,89% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Efisiensi Kontrak, efisiensi Narasumber, uang saku jaga stand, dan sound system serta perjalanan dinas tidak direduksi pada saat perubahan anggaran sehingga membebani realisasi.

b). Solusi

Guna kedepan harus konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.

2.2.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 25 program dan 174 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan sebesar Rp198.883.632.000,- dan realisasi sebesar Rp122.502.849.348,- atau sebesar 61,60% dengan realisasi fisik sebesar 95,38%. Adapun Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

2.2.3.1 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 5 program dan 41 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp16.687.270.000,- dan realisasi sebesar Rp14.644.182.196,- atau sebesar 87,76% dengan realisasi fisik sebesar 97,26%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Sisa anggaran yang tidak terserap, disebabkan antara lain:

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada pemeliharaan kendaraan dinas direalisasikan sesuai permintaan pemeliharaan;
2. Efisiensi perjalanan dinas pada kegiatan rapat koordinasi kedalam dan keluar daerah;
3. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan terkendala pada anggaran untuk premi asuransi nelayan di beberapa Kab/Kota belum optimal dikarenakan pihak Dinas terkait Kab/Kota dengan minimnya keterbatasan waktu untuk menengani pendataan nelayan di setiap Kab/Kota;
4. Kegiatan Pengembangan Usaha Pelabuhan terdapat efisiensi anggaran karena terjadi duplikasi anggaran dari kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan terdapat efisiensi anggaran dari belanja listrik;
6. Adanya sisa Anggaran tidak di Gunakan, karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada sub tolok ukur Pokmaswas.

b). Solusi

1. Perlu adanya tahapan-tahapan perencanaan program pembangunan, sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
2. pada TA. 2019 untuk perjalanan dinas dilaksanakan pada masing-masing kegiatan;

3. Perlu dilakukannya evaluasi dan kajian dalam menentukan perencanaan program/kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

2.2.3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 5 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.977.050.000,- dan realisasi sebesar Rp15.071.154.047,- atau sebesar 94,33% dengan realisasi fisik sebesar 99,51%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada tolok ukur Penyediaan HUT Banten dan Banten Expo yang tidak terserap 0,00% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp57.600.000,- hal ini dikarenakan kode rekening anggaran penyewaan tenda dan perlengkapan event tidak terbelanjakan karena kegiatannya dilaksanakan oleh seksi promosi pariwisata;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pada tolok ukur Peningkatan kompetensi aparatur yang hanya terserap Rp4.100.000,- atau sekitar 34,17% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp12.000.000,-, Hal ini dikarenakan anggaran belanja jasa pengiriman kursus singkat bagi ASN yang telah disediakan tidak dapat dibelanjakan, serta minimnya surat undangan yang masuk yang meminta aparatur PNS dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis;
3. Kegiatan Promosi Pariwisata Provinsi Banten terdapat efisinsi Narasumber, kontrak dan belanja dokumentasi, publikasi;
4. Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata pada tolok ukur Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang hanya terserap sekitar 3,47% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp30.000.000,- dikarenakan anggaran untuk belanja jasa konsultan tidak dapat dibelanjakan karena pihak BPS selaku pihak penyedia yang

dikerjasamai oleh Bidang Pemasaran untuk melakukan kegiatan penyusunan tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan padatnya aktifitas jadwal kegiatan para tim penyusun di BPS;

5. Kegiatan Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia terdapat efisiensi jasa kesenian (dikarenakan tempat tidak dimungkinkan dan narasumber dari pusat tidak dapat hadir).

b). Solusi

1. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi yang optimal dan menyeluruh kepada seluruh unit kerja dilingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
2. Penguatan internalisasi perencanaan yang dikoordinir oleh Sekretariat Dinas melalui Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan untuk memetakan kegiatan yang menjadi kewenangan unit kerja serta mengoptimalkan skala prioritas pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
3. Perlunya meningkatkan intensitas dalam menjalin komunikasi antar instansi/OPD agar dapat menjadi pembuka wawasan ketika terjadi permasalahan teknis dan non teknis yang dapat menghambat capaian kinerja sehingga mudah dilakukan pemecahan sebaik – baiknya;
4. Memperhatikan target rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2017 – 2022 sehingga tidak ditemukan duplikasi kegiatan serta mendukung kebijakan pembangunan yang terarah.

2.2.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 7 program dan 44 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp36.199.310.000,- dan realisasi sebesar Rp33.953.229.227,- atau sebesar 93,80% dengan realisasi fisik sebesar 98,91%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman pangan terserap realisasi keuangan sebesar 78,98%. Hal ini dikarenakan penyerapan pada belanja jasa tenaga kerja pertanian tidak seluruhnya diserap;
2. Pada kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan, realisasi keuangan yang terserap sebesar 83,80%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada honor biaya panen;
3. Pada kegiatan pelayanan teknis sertifikasi dan pengawasan tanaman pangan, realisasi keuangan yang ada sebesar 82,87% Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada biaya pengujian;
4. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura hanya terserap keuangan sebesar 83,19%, hal ini dikarenakan tidak terserapnya belanja bibit manggis, dikarenakan ketidaksesuaian spesifikasi;
5. Pada kegiatan Produksi dan pemasaran benih tanaman hortikultura, realisasi keuangan yang ada sebesar 61,94%. Hal ini dikarenakan rendahnya penyerapan pada belanja bahan kimia. Kondisi ini terkait ketidaktersediaan benih sumber, ketidaktersediaan lokasi rekomendasi penangkar;
6. Kegiatan Produksi dan pemasaran benih tanaman perkebunan; dan kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan disebabkan tidak maksimalnya penyerapan pada belanja bahan kimia dan belanja jasa tenaga kerja, oleh karena ketidaktersediaan benih sumber dan lokasi rekomendasi penangkaran;
7. Kegiatan Pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan, realisasi keuangan yang tercapai sebesar 88,01%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada belanja sewa ruang.

b). Solusi

1. Diperlukannya petunjuk pelaksanaan APBD yang lebih jelas dan sosialisasi yang baik terhadap SKPD;
2. Diperlukannya pemahaman yang sama antara instansi pemerintah terhadap pelaksanaan APBD;
3. Pada Produksi dan pemasaran benih tanaman perkebunan dialokasikan pengadaan lahan untuk penangkaran Benih.

2.2.3.4 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp8.440.592.000,- dan realisasi sebesar Rp7.855.464.190,- atau sebesar 93,07% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang kehutanan rata-rata disebabkan sisa anggaran tidak digunakan dan efisiensi kontrak pengadaan, serta efisiensi anggaran;
2. Terjadinya kerusakan DAS
Akhir-akhir ini kondisi sumberdaya hutan dan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) cenderung menurun, yang menimbulkan dampak negatif seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor yang terjadi di berbagai tempat, sehingga peranannya sebagai penyangga kehidupan kurang optimal serta akibat penebangan hutan secara illegal, kebakaran hutan, perambahan hutan eksploitasi hutan yang berlebihan serta penggarapan lahan yang tidak memperhatikan kaidah- kaidah konservasi tanah dan air serta belum mantapnya perangkat lunak pembangunan perusahaan hutan, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kehutanan mengakibatkan terjadinya deforestasi;
3. Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten yang belum tertangani, Jumlah total lahan kritis di Provinsi Banten seluas 193.770,06 Ha, tersebar di 4 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Banten (kota Serang, Cilegon, Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang dan Tangerang);
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat Hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten memiliki potensi yang cukup besar dan belum dapat dioptimalkan dengan baik meskipun tidak semua jenis HHBK tersebar serta dikelola dan diusahakan di setiap daerah di wilayah Provinsi Banten.

b). Solusi

1. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan hutan dan lahan maka diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan yang rusak dan lahan kritis, serta pemulihan kembali fungsi daerah aliran sungai (DAS). Untuk menangani upaya pemulihan hutan yang rusak dan lahan kritis maka perlu dikelola secara baik dan tepat sasaran melalui sistem pengelolaan DAS;
2. Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis perlu terus ditingkatkan mengingat makin seringnya terjadi bencana banjir dan tanah longsor, yang salah satunya disebabkan oleh semakin menurunnya daya dukung lingkungan;
3. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat antara lain :
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan maupun skala ekonomi budidaya tanaman kehutanan, dengan membentuk suatu perwilayahan komoditas dalam suatu wilayah hamparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan nilai ekonomi produk.
 - Meningkatkan sumberdaya petani hutan dan aparatur maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha kehutanan dapat dilaksanakan secara professional.
 - Pemanfaatan dan optimalisasi lembaga-lembaga terkait dalam mengintensifkan permodalan usaha petani dan memanfaatkan sistem informasi pasar.

2.2.3.5 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral didukung oleh 4 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp30.867.530.000,- dan realisasi sebesar Rp30.545.947.095,- atau sebesar 98,96% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Terdapat target kinerja di kegiatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan yaitu hanya terelasisasi 9.900 RTS dari Target 9.832 RTS, karena adanya kendala teknis lapangan sehingga terdapat 66 RTS tidak terealisasi. sebagaimana dimaksud diatas adalah bahwa selama proses pelaksanaan pemasangan Instalasi Rumah (IR), terdapat beberapa permasalahan terkait dengan calon penerima Bantuan Sosial yang dalam dokumen penganggaranya (DPA) telah tercantum nama definitif dan alamatnya (by name and by adress), yaitu diantaranya sangat berkaitan dengan data dari TNP2K tentang rumah tangga miskin yang layak mendapat bantuan sosial listrik perdesaan, By Name By Adress (harus sesuai dengan ID calon konsumen), serta data dari PT. PLN (Persero) tentang sudah tidaknya mereka memiliki ID. Pelanggan PLN, serta data tersebut bersifat Dinamis artinya sukar diprediksi apa dan bagaimana serta kapan data tersebut berubah.

b). Solusi

Dibutuhkan koordinasi dan ketepatan dalam mengontrol dan memonitoring data tersebut ke instansi terkait dalam hal ini PT. PLN rayon terkait, sehingga data dapat benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.3.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 4 program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp5.133.984.500,- dan realisasi sebesar Rp4.822.833.542,- atau sebesar 93,94% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2.2.3.7 Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Pada Urusan Pilihan Bidang Perindustrian didukung oleh 3 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp85.577.895.500,- dan realisasi sebesar Rp15.610.039.051,- atau sebesar 18,24% dengan realisasi fisik sebesar 71,99%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdapat Efisiensi Honorarium Narasumber (Narasumber tidak dapat hadir);
2. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Belanja pengadaan lahan Pusat Distribusi Provinsi yang berlokasi di Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp68,691,890,920,- dan hanya direalisasikan sebesar Rp476,333,100,- belum dapat dibayarkan kepada masyarakat karena mengalami kendala keterbatasan waktu;
3. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri terdapat efisiensi perjalanan dinas.

b). Solusi

1. Melakukan perencanaan ulang pengadaan lahan Pusat Distribusi Provinsi pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor untuk tahun 2019;
2. Proses Perencanaan terkait perjalanan dinas tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

2.2.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7 Urusan Bidang 27 program dan 265 kegiatan yang tersebar di 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Penghubung; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah; Inspektorat Provinsi; Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan), dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp636.749.950.000,- dan realisasi sebesar Rp562.882.523.397,- atau sebesar 88,40% dengan realisasi fisik sebesar 90,63%. Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

2.2.4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan didukung oleh 12 program dan 111 kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD, Badan Penghubung, Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Perekonomian, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, dan Biro Kesejahteraan Rakyat) Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp403.807.300.000,- dan realisasi sebesar Rp363.921.989.666,- atau sebesar 90,12% dengan realisasi fisik sebesar 97,41%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah:

Sekretariat DPRD

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor disebabkan gagal lelang pengadaan CCTV;
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat Efisiensi dari MCU anggota Dewan dari 85 hanya 18 yang MCU dan Efisiensi Kontrak;

3. Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten terdapat efisiensi dari perjalanan dinas;
 4. Kegiatan Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum terdapat Satu Peraturan Daerah terkait BUMD Agri Bisnis belum selesai.
- b). Solusi
1. Di tahun 2019 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada pengadaan CCTV tidak dianggarkan lagi akan tetapi akan dianggarkan kembali di tahun 2020;
 2. Peraturan Daerah terkait BUMD Agri Bisnis menunggu hasil revisi RPJMD.

Badan Penghubung

- a). Permasalahan
1. Capaian Retribusi kurang maksimal diakibatkan Kurangnya sosialisasi dan promosi Wisma ke tiap OPD dan Kabupaten/Kota serta masyarakat umum karena terhambat anggaran;
 2. Kurangnya Kamar Hunian dan Ruang Rapat serta kurangnya bentuk tampilan interior Wisma dan Kantor sehingga berdampak pada tidak tercapainya Target Wisma;
 3. Anggaran Renovasi pemeliharaan Wisma dan Kantor sudah diusulkan atas dasar arahan Komisi I DPRD Provinsi Banten;
- b). Solusi
1. Meningkatkan sosialisasi dan promosi Wisma ke Kabupaten/Kota serta masyarakat umum serta menyampaikan Surat ke tiap OPD tentang penggunaan Wisma untuk layanan kedinasan dan layanan terhadap masyarakat;
 2. Kedepan akan diusulkan penganggaran kembali dengan menghitung dan merencanakan pengembang kamar dan ruang rapat serta perubah design dan interior tampilan wisma dan kantor.

Biro Hukum

- a). Permasalahan
1. Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum terealisasi hanya sebesar (64,96%) karena ada tolok ukur Rapat Koordinasi ke dalam dan keluar daerah yang realisasi anggarannya rendah, dimana penggunaannya hanya sebagai fasilitasi dari beberapa kegiatan yang ada di Biro Hukum;

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terealisasi hanya sebesar (30,09%) karena kegiatan penyusunan Raperda memiliki ketergantungan dengan pengusul Raperda sehingga terdapat efisiensi anggaran (satu kali pelaksanaan menghasilkan beberapa output);
3. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota terealisasi hanya sebesar (61,58%) karena terdapat belanja narasumber/infrastruktur yang tidak diserap karena telah lewat batas waktu pembahasan kegiatan sehingga terdapat efisiensi anggaran disebabkan narasumber tidak dapat hadir;
4. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum terealisasi hanya sebesar (47,22%) terdapat tolo ukur yang tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut dilaksanakan apabila ada permasalahan hukum (non litigasi) atas dasar permintaan pimpinan (Gubernur);
5. Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Terealisasi hanya sebesar (75,44%) terdapat efisiensi anggaransisa kontrak pada kegiatan penggandaan produk hukum;
6. Terdapat 3 kegiatan yang tidak mencapai target kinerja sesuai dengan yang rencanakan, karena ketiga kegiatan tersebut dapat berjalan apabila ada permintaan dari pihak ketiga seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LBH (Lembaga Bantuan Hukum), Jaksa Pengacara Negara (JPN).
7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah memiliki ketergantungan dengan usulan Raperda sehingga dapat mempengaruhi realisasi menjadi rendah disebabkan oleh :
 - a). Raperda yang direncanakan dibahas 3 kali hanya dibahas 1 kali sehingga menjadi efisiensi dan percepatan.
 - b). Raperda usul Gubernur sesuai SK DPRD No. 161-35 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5 (lima) Raperda yaitu:
 - Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Raperda tentang RZWP3K;
 - Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri;
 - Raperda tentang Rencana Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Bisnis;
 - Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Agro Bisnis.

- c). Raperda angka 1 sampai dengan angka 4 telah disampaikan Gubernur artinya keluaran dari tolok ukur 4 Raperda yang ditargetkan telah dibahas DPRD;
 - d). Raperda tentang Pembentukan PT. Agribisnis berdasarkan Surat Menteri Nomor 539/6417/SJ tanggal 27 Agustus 2018 perihal Penilaian Atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Provinsi Banten perlu terlebih dahulu tercantum dalam RPJMD dan adanya study kelayakan/anlisis sehingga Raperda Penyertaan Modal tidak disampaikan dan menjadi prioritas untuk tahun berikutnya tahun anggaran 2019.
8. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum terdapat 2 tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan karena:
- a). Tolok ukur kegiatan Pendapat Hukum (Legal Memorandum) dilaksanakan karena belum/tidak ada permintaan kepada Biro Hukum untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Memorandum);
 - b). Tolok ukur kegiatan Forum Diskusi Permasalahan Hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi) direncanakan 6 kegiatan terealisasi hanya 4 kegiatan karena kegiatan tersebut dilaksanakan apabila ada perintah dari pimpinan (Gubernur) untuk membahas permasalahan hukum (non litigasi).
9. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum ada 1 tolok ukur kegiatan yang dilaksanakan karena terdapat 1 perkara yang naik banding (belum inkrah) sehingga belum dibayarkan untuk belanja tenaga ahli.
- b). Solusi
- Perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya lebih cermat dan teliti.

Biro Organisasi

a). Permasalahan

1. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan anggaran kegiatan kurang memperhatikan Rencana Operasional Kegiatan (ROK), sehingga ini dapat dilihat dari target capaian kinerja bulanan masing masing kegiatan ada yang tidak tercapai;
2. Ada beberapa pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan anggaran kegiatan serapan realisasi keuangan tidak

mencapai target yang ditentukan disebabkan adanya efisiensi dari masing masing kegiatan.

b). Solusi

Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat memperhatikan Rencana Operasional (ROK) agar target capaian kinerja bulanan dan triwulan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a). Permasalahan

1. Kegiatan Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA terdapat efisiensi dari belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum;
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pertanahan, dan kegiatan Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan Terdapat Deviasi pada belanja Narasumber;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disebabkan karena penyusunan hanya sampai draft sampai paraf koordinasi, posisi saat ini sudah di Biro Hukum.

b). Solusi

Penyusunan tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan akan mempedomani peraturan yang berlaku.

Biro Umum

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Pengadaan sarana Prasarana Kantor terkendala pada Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 Mini Bus Batal Pengadaan (Batal Lelang), dan efisiensi sisa pelaksanaan kontrak;
2. Kegiatan Distribusi dan Pemeliharaan disebabkan pada Reimburse BBM masing-masing pemegang kendaraan tidak maksimal dan Selisih harga BBM antara Pagu dan Harga BBM di Pertamina;

b). Solusi

Solusi untuk kedua permasalahan ini adalah dengan memperhitungkan secara cermat kebutuhan Belanja pada kegiatan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan optimal kedalam Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Biro Bina Perekonomian

a). Permasalahan

1. Kegiatan Tata Usaha Biro Perekonomian terdapat honararium Non ASN tidak di serap, pawai kendaraan Banten Expo dan efisiensi barang jasa perkantoran sesuai kebutuhan;
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM disebabkan output naskah akademik tentang pusat distribusi Provinsi Banten tidak memenuhi target;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi disebabkan output kebijakan perencanaan tenaga kerja daerah tidak memenuhi target;
4. Biro Bina Perekonomian sebagai Perangkat Daerah baru tentu membutuhkan ASN yang lebih memadai serta memahami program dan kegiatan.
5. Honorarium Non ASN yang tidak terserap.
6. Terdapat Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas yang tidak diserap.

b). Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah pada Penyusunan tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan akan mempedomani peraturan yang berlaku.

Biro Kesejahteraan Rakyat

a). Permasalahan

1. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan anggaran kegiatan kurang memperhatikan Rencana Operasional Kegiatan (ROK), sehingga ini dapat dilihat dari target capaian kinerja bulanan masing masing kegiatan ada yang tidak tercapai;
2. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan anggaran kegiatan Serapan realisasi Keuangan tidak mencapai target yang ditentukan disebabkan adanya efesiensi;
3. Jaringan Internet Kominfo sering mengalami trouble;
4. Sistem SIMRAL kadang-kadang error, berdampak pada keterlambatan input data dan output laporan keuangan;
5. Kurangnya fasilitas kerja seperti computer, laptop, dan printer;

6. Permasalahan terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan secara umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat, antara lain :
 - Kurangnya kemampuan SDM dalam Perumusan Kebijakan sesuai Tupoksi masing-masing. Sehingga output yang dihasilkan kurang maksimal;
 - Pada Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan Agama Tolok Ukur Pemantapan dan Koordinasi Kebijakan Penanganan Haji, Kekurangan anggaran dalam memfasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

b). Solusi

1. Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat memperhatikan Rencana Operasional (ROK) agar target capaian kinerja bulanan dan triwulan dapat tercapai sesuai yang diharapkan;
2. Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bisa lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu;
3. Kurangnya kemampuan SDM dalam Perumusan Kebijakan dapat disiasati dengan Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Perumusan Kebijakan sebagai panduan;
4. Kekurangan anggaran dalam memfasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah bisa disiasati dengan meminta kepada Kabupaten/Kota untuk turut menanggarkan pembiayaan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD);
5. Untuk Jaringan internet yang sering trouble, yang mengakibatkan SIMRAL sering eror sehingga menyebabkan keterlambatan input, maka solusinya berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Kominfo;
6. Untuk Kurangnya Fasilitas Kerja, Solusinya Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Hal Ini Biro Umum.

Biro Pemerintahan

a). Permasalahan

Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2018, diantaranya :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah disebabkan Belum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Peraturan Gubernur tentang Kerjasama Daerah, sehingga tidak dilaksanakan;
2. Belum adanya rincian dan indikator terkait pengukuran nilai IKM.

b). Solusi

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. Terkait dengan pensuin ASN seharusnya sudah dapat di prediksi jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.

Biro Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan

a). Permasalahan

Beberapa tolok ukur kegitan dengan penyerapan anggaran yang kurang maksimal dan Kode Rekening Belanja di beberapa Tolak Ukur tidak terserap dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kegiatan Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan pada Tolok Ukur Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Biro ARTP terdapat Belanja Sewa Gudang, anggaran tidak dapat dilaksanakan dikarenakan lokasi yang disurvey belum memenuhi syarat ditetapkan

sehingga tidak dapat dilaksanakan. Pada Belanja Perjalanan Dinas terdapat efisiensi dikarenakan pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dimaksud;

2. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, antara lain :

- Pada Tolok ukur Peningkatan Pelayanan Koordinasi Ke Pusat, Dalam Daerah dan Luar Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat efisiensi anggaran untuk belanja jasa Tenaga Ahli (staf khusus sebanyak 10 orang dengan nominal 1,4 M) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan belanja tersebut;
- Pada Tolok Ukur Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan anggaran tersebut disesuaikan dengan permintaan dari pimpinan;
- Pada Tolok Ukur Penyediaan Fasilitas Jasa Kantor terdapat belanja sewa sarana mobilitas darat yang dianggarkan untuk fasilitasi kegiatan pimpinan di Luar Daerah yang memerlukan kendaraan tambahan sebagai optimalisasi pelayanan kepada pimpinan, namun sampai dengan akhir tahun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan fasilitas saat ini masih mencukupi sehingga anggaran tersebut dikembalikan ke kas Negara sebagai efisiensi anggaran.

3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Tolok Ukur Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Sarana Dan Prasarana Pimpinan Terdapat efisiensi anggaran pada belanja sewa rumah dinas Pimpinan (Wakil Gubernur). Hal ini berkaitan dengan belum tersedianya peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Sedangkan untuk belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan rumah dinas pimpinan dan kendaraan dinas pimpinan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada.

b). Solusi

1. Penyusunan tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan akan mempedomani peraturan yang berlaku;
2. Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan agar SK terkait usulan Staf khusus segera diproses;

3. SK terkait Pengalihan Rumah Dinas Wakil Gubernur ke Gubernur pada kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana agar segera diproses.

2.2.4.2 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan didukung oleh 2 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp20.667.150.000,- dan realisasi sebesar Rp15.692.373.872,- atau sebesar 75,93% dengan realisasi fisik sebesar 87,49%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran tidak mencapai target, rata-rata disebabkan adanya efisiensi anggaran dari nilai kontrak, efisiensi nilai barang dan jasa;
2. Pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor dan kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran terdapat sisa anggaran disebabkan efisiensi kontrak dan efisiensi nilai barang dan jasa serta adanya penyesuaian kebutuhan;
3. Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur pada tolok ukur kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup waktu;
4. Kegiatan Perencanaan , evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Data Pembangunan Sektoral disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas dan honorarium narasumber;
5. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya saran dari Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia untuk penataan arsip Inspektorat Provinsi Banten harus secara komprehensif mengingat saat belum tertata maksimal dan butuh anggaran satu paket sebesar

400 juta, sedangkan saat ini tidak mencukupi ditangguhkan ke Tahun 2019;

6. Kegiatan Evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi Banten dengan progress fisik 85% dan Keuangan 58.66%, disebabkan adanya tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan karena disesuaikan dengan jadwal pusat dan Belanja Jasa narasumber yang tidak terserap semuanya;
7. Kegiatan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan dengan progress fisik 89% dan Keuangan 65.88%, disebabkan adanya pengeluaran anggaran disesuaikan dengan adanya kasus-kasus yang masuk di Inspektorat dan perjalanan dinas pengawasan;
8. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan beberapa kegiatan antara lain: Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan; Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah; dan Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah terkendala karena Terdapat kegiatan bidang pengawasan diluar Program Kerja Pengawasan Tahunan.

b). Solusi

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan sudah dianggarkan satu paket di tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar 500 juta;
2. Untuk solusi dari permasalahan pada kegiatan-kegiatan terhadap Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Alokasi kegiatan di tahun 2019 akan menyesuaikan dengan penyerapan realisasi 2018.

2.2.4.3 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp28.872.578.800,- dan realisasi sebesar Rp21.805.131.509,- atau sebesar 75,52% dengan realisasi fisik sebesar 88,52%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Fasilitas Sekretariat Bersama Banten Lama, namun dikarenakan kondisi teknis lokasi tidak memungkinkan, maka sub tolok ukur ini tidak dapat dilaksanakan;
2. Rencana Induk Kawasan Banten Lama, sub tolok ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan;
3. Visualisasi Revitalisasi Kawasan Banten Lama sub tolok ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

b). Solusi

Solusi untuk permasalahan tersebut untuk pertimbangan penyusunan perencanaan tahun 2019 adalah agar lebih meningkatkan kecermatan dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga output kegiatan dapat tercapai.

2.2.4.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan didukung oleh 6 program dan 78 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp126.056.280.000,- dan realisasi sebesar Rp111.107.967.220,- atau sebesar 88,14% dengan realisasi fisik sebesar 99,30%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan, adalah:

Badan Pendapatan Daerah

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung, rendahnya penyerapan diakibatkan adanya Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan dinas dan

Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan;

2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah; Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung; dan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cildug, rendahnya penyerapan diakibatkan Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
3. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, disebabkan adanya Efisiensi pada Uang Makan Extra Fooding karena adanya pendampingan penataan arsip;
4. Kegiatan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah disebabkan adanya Efisiensi Belanja pada Penyusunan Rapergub tentang petunjuk pelaksanaan PERDA tentang Pajak Daerah dikarenakan keterlambatan;
5. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, terdapat Efisiensi dari Belanja Jasa Konsultansi Standarisasi Manajemen Mutu Iso;
6. Permasalahan Pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
7. Hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan penyerapan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten antara lain; adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2018, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya pengunduran diri penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah *out of stock/discontinue* atau *indent*.

b). Solusi

Solusi yang dapat ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, antara lain:

1. Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan;
2. Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan;
3. Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat;
4. Perlu dilakukan koordinatif planning dalam penyusunan anggaran sesuai kebutuhan yang rasional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran terserap 74,75% disebabkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pengaspalan pada Kantor BPKAD) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan bersamaan waktunya dengan lelang kendaraan dinas dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak cukup;
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat efisiensi belanja rutin operasional kantor dan tolok ukur HUT Banten Expo Tidak dilaksanakan;
3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah, terdapat efisiensi belanja perjalanan dinas study tiru;
4. Kegiatan Penyusunan Pedoman anggaran terserap 73,23% disebabkan efisiensi cetak penggandaan, Belanja Jasa Narasumber tidak direalisasikan 100% karena Pengiriman/Penugasan Narasumber tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan dan efisiensi belanja perlengkapan peserta berupa tas tidak direalisasikan karena bertentangan dengan Pergub Nomor 82 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Provinsi Banten;
5. Pada Kegiatan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang APBD dan Perubahan APBD, dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi terdapat Efisiensi Jasa Narasumber;
6. Efisiensi belanja cetak pada Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten, dan kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang terdapat efisiensi belanja cetak dan jasa narasumber;

7. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah, anggaran terserap 47,22%, hal ini adanya efisiensi Honorarium Tim Non PNS dan Jasa Narasumber tidak diserap dikarenakan SSH tidak sesuai, serta efisiensi belanja Sertifikasi dari target 124 Sertifikat selesai 25 Bidang, masih proses 15 bidang dan bermasalah dengan Kab/Kota 6 bidang, sisa 78 bidang data belum lengkap.
8. Secara umum, rendahnya capaian kinerja BPKAD disebabkan oleh efisiensi belanja jasa narasumber, efisiensi dari kontrak/LS, dan efisiensi belanja sertifikasi.

b). Solusi

Solusi dari permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditempuh, antara lain:

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
2. Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA;
3. Meningkatkan Kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara berkesinambungan, dan Meningkatkan kualitas kegiatan.

2.2.4.5 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp10.326.110.000,- dan realisasi sebesar Rp7.700.911.864,- atau sebesar 74,58% dengan realisasi fisik sebesar 91,46%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan terkendala karena Dalam proses pelaksanaan pengadaan pegawai (CPNS) regulasi

atau kebijakan diatur oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Banten melaksanakan system pengadaan berbasis CAT. Sejak disusunnya formasi, penetapan formasi, pengumuman seleksi dan pelaksanaan seleksi sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui KEMENPAN RB dan BKN RI. Pemerintah Daerah hanya menjadi fasilitator dan sampai dengan akhir Desember 2018 pengumuman hasil seleksi CPNSD belum juga disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berdampak pada rencana yang sudah disusun pada tahun 2018 yaitu dengan menghasilkan pegawai melalui seleksi terbuka (CAT) untuk kemudian ditetapkan sebagai CPNS;

2. Kegiatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Pencapaian yang tidak maximal pada tahapan pemberian kesejahteraan/penghargaan terhadap pegawai melalui pemberian Satya Lencana bagi pegawai yang sudah memenuhi kriteria. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada awal tahun 2018 telah mengusulkan Satya Lencana sebanyak 203 pegawai, Sekretariat Negara Republik Indonesia hanya menetapkan sebanyak 189 pegawai pada bulan Oktober 2018. Hal ini berakibat dengan tidak terserapnya penganggaran yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemberian Satya Lencana dimaksud;
3. Kegiatan Data dan Informasi Kepegawaian, permasalahannya adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada tahun 2018 bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk menyusun regulasi Pengukuran Kinerja berbasis elektronik. Penyusunan meliputi penyempurnaan system kepegawaian; penataan sarana prasarana pendukung dan penyusunan regulasi pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Terdapat anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan karena pada proses pelaksanaannya bisa dimungkinkan (pengabungan/merger system kepegawaian bersama system penganggaran dan system presensi/absensi pegawai);
4. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional, terkendala karena Belum dilaksanakannya pelantikan bagi pejabat fungsional karena masih menunggu proses penetapan Surat Keputusan, sehingga penyerapan hanya terserap 83,20%;

5. Kegiatan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi hanya terserap sebesar 34,63%, hal ini disebabkan karena Pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Madya masih dalam proses, sementara usulan untuk pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara RI;
6. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai anggaran terserap 90,05%, disebabkan karena Rencana pelaksanaan pengiriman kompetensi pegawai tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2018 akan tetapi diundur pelaksanaannya pada tahun 2019, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran.

b). Solusi

1. Pemerintah Daerah relative minimal, hal ini dikarenakan pelaksanaan seleksi CPNSD merupakan salah satu agenda Nasional yang menjadi prioritas dan berlaku secara menyeluruh;
2. Pengajuan Satya Lencana sebaiknya diusulkan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga dapat ditetapkan tepat waktu;
3. Penyusunan regulasi terkait Pergub Kinerja hendaknya diselesaikan terlebih dahulu sehingga penerapan/perbaikan dalam sistem mempunyai waktu yang cukup;
4. Meningkatkan koordinasi lebih intens bersama pihak terkait;
5. Badan Kepegawaian Daerah pada tahun sebelumnya menyampaikan usulan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan kondisi jabatan yang kosong dan segera menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD tahun berikutnya;
6. Pengiriman dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan pada triwulan 1 selambat-lambatnya pada triwulan 2.

2.2.4.6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp41.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp38.556.151.206,- atau sebesar 94,04% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, Terdapat efisiensi belanja cetak, honor sesuai dengan kebutuhan atau penggunaannya;
2. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral; Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan; dan Kegiatan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran terdapat efisiensi honorarium narasumber sesuai dengan kebutuhannya;
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajemen; Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama; dan Kegiatan Pengendalian Mutu Diklat terdapat efisiensi belanja cetak, perlengkapan peserta, dan honorarium narasumber;
4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan, terdapat efisiensi honorarium narasumber sesuai dengan kebutuhannya. Seperti anggaran untuk Esselon I namun yang hadir Esselon II.

b). Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut diatas yaitu pada saat tahap perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun kebutuhan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif sesuai dengan target perencanaan.

2.2.4.7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp6.020.531.200,- dan realisasi sebesar Rp4.097.998.060,- atau sebesar 68,07% dengan realisasi fisik sebesar 70,24%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, yaitu adanya Efisiensi Belanja Langsung DRD, SK masa Kerja DRD telah habis dan di tahun 2019 sudah tidak dianggarkan kembali.

2.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2018 yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio. Adapun capaian tersebut digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.38
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017 – 2018

URAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2017		2018	
	TARGET RPJMD	REALISASI	TARGET RPJMD	REALISASI
I P M (Poin)	71,35	71,42	71,77	71,77
L P E (%)	5,70	5,73	6,00	5,81
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,25	5,59	5,13	5,25
Persentase Pengangguran Terbuka (%)	8,69	9,28	8,45	8,52
Tingkat Inflasi (%)	4,00	3,98	3,70	3,42
Gini Ratio (%)	0,40	0,39	0,39	0,37

Sumber : BRS Provinsi Banten Tahun 2018

Sebagaimana tabel diatas, Indikator makro pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2018 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio mengalami fluktuasi.

Sub Bab ini menjelaskan rincian target dan realisasi capaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2018 pada setiap program yang diukur/dievaluasi capaiannya pada 129 program 230 indikator kinerja, dan rata-rata capaian sebesar 97,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.39
Capaian Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
MISI PERTAMA : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)								
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	2.92	104.13	Seluruh OPD	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	28 Bidang Urusan
2	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan: %)	30.00	30.00	100.00	Setda (Biro Organisasi)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
3	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Setda (Biro Pemerintahan)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
4	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %)	17.27	15.11	87.49	Setda (Biro Bina Perekonomian)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
5	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %)	100.00	80.00	80.00	Setda (Biro Hukum)	Pelayanan Umum,	Administrasi Pemerintahan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Kesejahteraan Masyarakat	
		Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Setda (Biro Hukum)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
		Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Setda (Biro Hukum)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
6	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur (Satuan: %)	75.00	74.00	98.67	Setda (Biro Bisda)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
7	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Setda (Biro Kesra)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
8	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Setda (Biro Adpem)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
		Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	75.00	96.00	128.00	Setda (Biro Adpem)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
9	Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan	Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Setda (Biro ARTP)	Pelayanan Umum,	Administrasi Pemerintahan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Kesejahteraan Masyarakat	
		Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %)	75.00	72.50	96.67	Setda (Biro ARTP)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
		Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Setda (Biro ARTP)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
10	Program Pelayanan Umum	Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	75.00	70.00	93.33	Setda (Biro Umum)	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Administrasi Pemerintahan
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	80.00	80.00	100.00	BPKAD	Pelayanan Umum	Keuangan
12	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	80.00	80.00	100.00	BPKAD	Pelayanan Umum	Keuangan
13	Program Penatausahaan Aset Daerah	capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100.00	96.01	96.01	BPKAD	Pelayanan Umum	Keuangan
14	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Sakip (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Inspektorat	Pelayanan Umum	Pengawasan
		Indeks Integritas (Satuan: poin)	73.48	72.01	98.00	Inspektorat	Pelayanan Umum	Pengawasan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	2.00	3.00	150.00	Inspektorat	Pelayanan Umum	Pengawasan
		Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100.00	100.00	100.00	Inspektorat	Pelayanan Umum	Pengawasan
15	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	30.26	34.32	113.42	Diskominfo	Pelayanan Umum	Komunikasi dan Informatika
16	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	20.00	24.98	124.90	Diskominfo	Pelayanan Umum	Komunikasi dan Informatika
17	Program Tata Kelola Persandian	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %)	20.00	20.00	100.00	Diskominfo	Pelayanan Umum	Persandian
18	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	50.00	50.00	100.00	Bappeda. Diskominfo	Pelayanan Umum	Statistik
19	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase dokumen perencanaan RPJPD RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Perencanaan
		Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Perencanaan
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	80.00	80.00	100.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Perencanaan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Perencanaan
20	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Perencanaan
21	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Perencanaan
22	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Perencanaan
23	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	85.00	82.09	96.58	BKD	Pelayanan Umum	Kepegawaian
		Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	85.00	85.00	100.00	BKD	Pelayanan Umum	Kepegawaian
		Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	85.00	77.04	90.64	BKD	Pelayanan Umum	Kepegawaian
24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)	85.00	67.85	79.82	BKD	Pelayanan Umum	Kepegawaian

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
25	Program Pengembangan SDM Aparatur	Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan. manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	80.00	88.72	110.90	BPSDM	Pelayanan Umum	Pendidikan dan Pelatihan
		Rasio peserta Diklat Teknis Umum. Substantif. dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	80.00	89.76	112.20	BPSDM	Pelayanan Umum	Pendidikan dan Pelatihan
26	Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)	80.00	93.97	117.46	BPSDM	Pelayanan Umum	Pendidikan dan Pelatihan
		Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	80.00	80.00	100.00	BPSDM	Pelayanan Umum	Pendidikan dan Pelatihan
27	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Satuan: %)	57.58	59.09	102.62	BPD	Pelayanan Umum	Keuangan
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (Satuan: %)	42.42	41.62	98.11	BPD	Pelayanan Umum	Keuangan
28	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Potensi Tunggal Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %)	14.20	27.27	192.04	BPD	Pelayanan Umum	Keuangan
29	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Satpol-PP	Pelayanan Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
30	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Satpol-PP	Pelayanan Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
31	Program Perlindungan Masyarakat	Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Satpol-PP	Pelayanan Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
32	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Satpol-PP	Pelayanan Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
33	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila. UUD 1945. Bhineka Tunggal Ika. NKRI (Satuan: %)	22.00	22.00	100.00	Badan Kesbangpol	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
34	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Badan Kesbangpol	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
35	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Badan Kesbangpol	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
								Perlindungan Masyarakat
36	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	0.00	0.00	0.00	Badan Kesbangpol	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	0.00	0.00	0.00	Badan Kesbangpol	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)	0.00	0.00	0.00	Badan Kesbangpol	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)	65.00	65.00	100.00	Badan Kesbangpol	Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
37	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100.00	79.16	79.16	BPBD	Pelayanan Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
38	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik. Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	BPBD	Pelayanan Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
39	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	BPBD	Pelayanan Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
40	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	64.86	61.64	95.04	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan dan Capil
		Rasio Pasangan berakte nikah(Satuan: %)	23.33	15.07	64.59	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan dan Capil
		Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	85.76	71.60	83.49	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan dan Capil
		Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk(Satuan: %)	79.19	74.29	93.81	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan dan Capil
		Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	85.00	83.62	98.38	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan dan Capil
41	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	100.00	95.00	95.00	Set DPRD	Pelayanan Umum	Administrasi Pemerintahan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Set DPRD	Pelayanan Umum	Administrasi Pemerintahan
		Capaian % Pelayanan Keprotokolan. kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Set DPRD	Pelayanan Umum	Administrasi Pemerintahan
42	Program Pembangunan Kemitraan	Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Badan Penghubung	Pelayanan Umum	Administrasi Pemerintahan
43	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	50.00	40.00	80.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Penelitian dan Pengembangan
		Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	50.00	50.00	100.00	Bappeda	Pelayanan Umum	Penelitian dan Pengembangan
MISI KEDUA : MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR								
44	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	79.56	91.41	114.89	DPUPR	Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	27.20	27.20	100.00	DPUPR	Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	86.30	88.70	102.78	DPUPR	Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
45	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	10.00	9.07	90.70	DPUPR	Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46	Program Penataan Ruang	Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)	25.00	20.00	80.00	DPUPR	Daya Saing Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	114.60	58.22	50.80	DPRKP	Pelayanan Umum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	84.02	309.50	368.36	DPRKP	Pelayanan Umum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
48	Program Keciaptakaryaan	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	72.75	74.90	102.96	DPRKP	Pelayanan Umum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	72.86	71.09	97.57	DPRKP	Pelayanan Umum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0.00	0.00	0.00	DPRKP	Pelayanan Umum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
49	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	20.00	20.00	100.00	Dishub	Pelayanan Umum	Perhubungan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0.00	0.00	0.00	Dishub	Pelayanan Umum	Perhubungan
50	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi (Satuan: %)	100.00	23.38	23.38	Dishub	Pelayanan Umum	Perhubungan
51	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	100.00	42.86	42.86	Dishub	Pelayanan Umum	Perhubungan
52	Program Pembangunan Sumberdaya Air	Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	20.89	20.81	99.62	DPUPR	Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: ha)	15.332,98	15312.06	99.86	DPUPR	Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	51.59	46.21	89.57	DPUPR	Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
53	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	25.00	25.00	100.00	DPRKP	Pelayanan Umum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	28.00	28.00	100.00	DPRKP	Pelayanan Umum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
54	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0.00	0.00	0.00	Dishub	Pelayanan Umum	Perhubungan
		Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	10.00	9.70	97.00	Dishub	Pelayanan Umum	Perhubungan
		Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	10.00	10.00	100.00	Dishub	Pelayanan Umum	Perhubungan
55	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)	0.00	0.00	0.00	Dishub	Pelayanan Umum	Perhubungan
MISI KETIGA : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS								
56	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	72.90	84.23	115.54	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	58.77	62.02	105.53	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0.22	0.21	95.45	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0.44	0.32	72.73	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)	98.64	100.00	101.38	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99.89	100.00	100.11	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	51.96	50.63	97.44	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	55.50	41.85	75.41	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	48.68	43.88	90.14	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	17.00	76.15	447.94	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
57	Program Pendidikan Khusus	Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	17.00	33.33	196.06	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
58	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: Nilai)	56.98	56.23	98.68	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)	64.86	64.57	99.55	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)	96.21	96.48	100.28	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
		Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)	54.63	92.85	169.96	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
59	Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %)	20.00	27.50	137.50	Dindikbud	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
60	Program Pelestarian Kebudayaan	Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	85.00	90.00	105.88	Dindikbud	Pelayanan Umum	Kebudayaan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	85.00	90.00	105.88	Dindikbud	Pelayanan Umum	Kebudayaan
		Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	85.00	90.00	105.88	Dindikbud	Pelayanan Umum	Kebudayaan
		Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	85.00	90.00	105.88	Dindikbud	Pelayanan Umum	Kebudayaan
61	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	85.00	90.00	105.88	Dindikbud	Pelayanan Umum	Kebudayaan
62	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	85.00	90.00	105.88	Dindikbud	Pelayanan Umum	Kebudayaan
		Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	85.00	90.00	105.88	Dindikbud	Pelayanan Umum	Kebudayaan
63	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri(Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Dispora	Pelayanan Umum	Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Dispora	Pelayanan Umum	Kepemudaan dan Olahraga
64	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Dispora	Pelayanan Umum	Kepemudaan dan Olahraga
65	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah. nasional dan internasional (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Dispora	Pelayanan Umum	Kepemudaan dan Olahraga

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
66	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)	75.00	66.00	88.00	Dispora	Pelayanan Umum	Kepemudaan dan Olahraga
67	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	60.00	60.00	100.00	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50.00	38.12	76.24	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58.72	55.11	93.85	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	75.00	71.37	95.16	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indek Ketahanan Keluarga (Satuan: %)	66.66	64.93	97.40	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
68	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	85.00	84.11	98.95	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %)	85.00	81.38	95.74	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	60.00	58.63	97.72	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
69	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)	85.00	85.00	100.00	DPKD	Pelayanan Umum	Perpustakaan
70	Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	DPKD	Pelayanan Umum	Perpustakaan
71	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	80.00	80.00	100.00	DPKD	Pelayanan Umum	Kearsipan
		Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	80.00	80.00	100.00	DPKD	Pelayanan Umum	Kearsipan
		Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	85.00	85.00	100.00	DPKD	Pelayanan Umum	Kearsipan
MISI KEEMPAT : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS								
72	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	65.00	84.35	129.77	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
		Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	55.00	55.00	100.00	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
73	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	90.00	91.50	101.67	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	65.00	75.21	115.71	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
		Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	20.00	20.00	100.00	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
		Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)	20.00	20.00	100.00	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
74	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)	75.00	75.00	100.00	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
75	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: orang)	70.00	70.00	100.00	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)	70.00	95.33	136.19	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
		Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)	50.00	31.03	62.06	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
76	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)	32.00	32.00	100.00	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
77	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %)	6.40	6.40	100.00	Dinkes	Kesejahteraan Masyarakat	Kesehatan
78	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan: %)	70.00	70.00	100.00	Dinkes	Pelayanan Umum	Kesehatan
		Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)	88.00	88.00	100.00	Dinkes	Pelayanan Umum	Kesehatan
		Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan: %)	70.00	69.00	98.57	Dinkes	Pelayanan Umum	Kesehatan
		Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)	60.00	48.00	80.00	Dinkes	Pelayanan Umum	Kesehatan
		Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	40.00	17.99	44.98	Dinkes	Pelayanan Umum	Kesehatan
		Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)	60.00	44.50	74.16	Dinkes	Pelayanan Umum	Kesehatan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
79	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2.33	2.23	95.71	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)	60.90	59.75	98.11	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)	10.26	10.23	99.71	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	2.53	2.31	91.30	DP3AKKB	Pelayanan Umum	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MISI KELIMA : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
80	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliyun)	13.40	18.63	139.03	DPMPPTSP	Pelayanan Umum	Penanaman Modal
		Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)	43.00	37.88	88.09	DPMPPTSP	Pelayanan Umum	Penanaman Modal
81	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	DPMPPTSP	Pelayanan Umum	Penanaman Modal
82	Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal	Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	DPMPPTSP	Pelayanan Umum	Penanaman Modal

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
83	Program Pengendalian Penanaman Modal	Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %)	17.03	26.13	153.44	DPMPTSP	Pelayanan Umum	Penanaman Modal
84	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	20.00	30.00	150.00	Disperindag	Kesejahteraan Masyarakat	Perindustrian
		Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	20.00	24.00	120.00	Disperindag	Kesejahteraan Masyarakat	Perindustrian
		Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	20.00	20.00	100.00	Disperindag	Kesejahteraan Masyarakat	Perindustrian
85	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: jumlah)	200	359	179.50	Disperindag	Kesejahteraan Masyarakat	Perindustrian
86	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	5.00	5.00	100.00	Disperindag	Pelayanan Umum	Perdagangan
		Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	10.00	10.00	100.00	Disperindag	Pelayanan Umum	Perdagangan
		capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %)	5.00	5.00	100.00	Disperindag	Pelayanan Umum	Perdagangan
		Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Disperindag	Pelayanan Umum	Perdagangan
87	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	2.970.27	(849.97)	Defisit	Disperindag	Pelayanan Umum	Perdagangan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
88	Program Perlindungan dan Pengawasan Industri	Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai)	108.00	108.55	100.51	Disperindag	Pelayanan Umum	Perdagangan
89	Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi(Satuan: %)	80.00	80.00	100.00	Disperindag	Pelayanan Umum	Perdagangan
90	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	8.01	8.00	99.88	DKP	Pelayanan Umum	Kelautan dan Perikanan
91	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	60.00	22.72	37.87	DKP	Pelayanan Umum	Kelautan dan Perikanan
92	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	DKP	Pelayanan Umum	Kelautan dan Perikanan
93	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: nilai)	116	123	106.25	DKP	Pelayanan Umum	Kelautan dan Perikanan
94	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan (Satuan: %)	95.10	95.01	99.91	Dinas Ketapang	Pelayanan Umum	Pangan
95	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	82.50	100.00	121.21	Dinas Ketapang	Pelayanan Umum	Pangan
96	Program Perlindungan Konsumen Pangan	Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	90.00	100.00	111.11	Dinas Ketapang	Pelayanan Umum	Pangan
97	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	1.00	1.00	100.00	Dispar	Pelayanan Umum	Pariwisata
98	Program Pemasaran Produk Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	15.146.936	13.191.096	87.09	Dispar	Pelayanan Umum	Pariwisata

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1.36	1.36	100.00	Dispar	Pelayanan Umum	Pariwisata
		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3.743.525	2.859.840	76.39	Dispar	Pelayanan Umum	Pariwisata
99	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang)	300	300	100.00	Dispar	Pelayanan Umum	Pariwisata
100	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %)	20.00	20.00	100.00	Dispar	Pelayanan Umum	Pariwisata
101	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Capaian Koperasi Aktif(Satuan: %)	6.00	6.00	100.00	Dinas K-UKM	Pelayanan Umum	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
102	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	6.00	6.00	100.00	Dinas K-UKM	Pelayanan Umum	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
103	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)	6.00	6.00	100.00	Dinas K-UKM	Pelayanan Umum	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)	1.00	1.00	100.00	Dinas K-UKM	Pelayanan Umum	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
104	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	1.00	1.00	100.00	Dinas K-UKM	Pelayanan Umum	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
105	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Orang)	573	733	127.92	Dinsos	Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
106	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial (Satuan: Orang)	1.505	1730	114.95	Dinsos	Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
107	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Updating Data PMKS (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Dinsos	Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
		Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang)	1.300	1.300	100.00	Dinsos	Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
		Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: kk)	30.000	32.412	108.04	Dinsos	Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
108	Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial (Satuan: kk)	940	1.021	108.62	Dinsos	Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
109	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (Satuan: Orang)	110	110	100.00	Dinsos	Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
110	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti	Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan: Orang)	160	160	100.00	Dinsos	Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
111	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga)	10.000	10.000	100.00	Dinas ESDM	Pelayanan Umum	Energi dan Sumberdaya Mineral

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
112	Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan: %)	16.17	16.17	100.00	Dinas ESDM	Pelayanan Umum	Energi dan Sumberdaya Mineral
113	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	65.00	65.00	100.00	Dinas ESDM	Pelayanan Umum	Energi dan Sumberdaya Mineral
		Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	41.10	41.10	100.00	Dinas ESDM	Pelayanan Umum	Energi dan Sumberdaya Mineral
114	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: Desa)	2.00	4.00	200.00	Dinas PMD	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)	2.00	0.00	0.00	Dinas PMD	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Masyarakat Desa
115	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: Jumlah)	41.00	41.00	100.00	Dinas PMD	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Masyarakat Desa
116	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: Jumlah)	2.00	0.00	0.00	Dinas PMD	Pelayanan Umum	Pemberdayaan Masyarakat Desa
117	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4.35	6.82	156.78	Disnakertrans	Pelayanan Umum	Ketenaga Kerjaan
118	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	3.66	3.02	82.51	Disnakertrans	Pelayanan Umum	Ketenaga Kerjaan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10.00	10.00	100.00	Disnakertrans	Pelayanan Umum	Ketenaga Kerjaan
		Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9.51	10.00	105.15	Disnakertrans	Pelayanan Umum	Ketenaga Kerjaan
119	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	2.98	0.93	31.21	Disnakertrans	Pelayanan Umum	Ketenaga Kerjaan
120	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	15.25	13.92	91.28	Disnakertrans	Pelayanan Umum	Ketenaga Kerjaan
121	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1.25	2.05	164.00	Disnakertrans	Pelayanan Umum	Ketenaga Kerjaan
122	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	51.50	44.87	87.13	DLHK	Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	59.00	72.36	122.64	DLHK	Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup
		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	52	88	169.23	DLHK	Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup
123	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi (Satuan: Hektar)	5.000	7.990	159.80	DLHK	Pelayanan Umum	Kehutanan
		Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	10.00	11.28	112.80	DLHK	Pelayanan Umum	Kehutanan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
124	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha)	57.35	48.88	85.23	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
		Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2.408.671	1.603.556	66.57	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
		Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	21.579	210.556	975.74	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
		Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	7.141	14.751	206.57	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
125	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	8.246	10.977	133.12	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
		Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	735	921	125.27	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
126	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan: Kg/Ha)	3.343,20	2.043,93	61.14	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
		Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	1.728	4.168	241.18	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
		Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	43.978	44.833	101.95	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
127	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton)	33.52	23.47	70.02	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
128	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	85.00	85.00	100.00	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Perangkat Daerah	Aspek	Bidang Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
129	Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00	Distan	Pelayanan Umum	Pertanian
129 Program		230 Indikator	Rata-rata (%)		97.11	41 PD		